



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG



JL. Cimuncang No.21D, Bandung

2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Sekapur Sirih



*Bismillaahirrahmaannirrohiim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua
Om swastiastu, namo buddhaya
Salam kebajikan,*

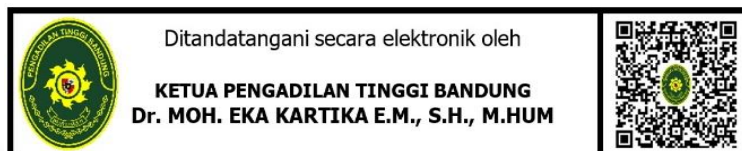
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran kepada Allah SubhanahuWata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun rangkaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dalam **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2024.**

Laporan Kegiatan Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu instrument pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. di samping itu laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tugas pokok tersebut guna peningkatan di tahun yang akan datang.

Dalam Laporan ini kami sampaikan hasil capaian yang telah diraih Pengadilan Tinggi Bandung selama tahun 2024 serta kami laporkan pula kekurangan, hambatan dan rekomendasi dalam pelaksanaan kerja, dengan ini diharapkan, pelaksanaan tugas dan kerja Pengadilan Tinggi Bandung yang sudah terlampaui menjadi acuan untuk kinerja di tahun mendatang guna memaksimalkan capaian kinerja yang mendukung Visi Misi Mahkamah Agung dan diimplementasikan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dari para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural/Fungsional dan Staf yang tergabung dalam Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024 ini sehingga dapat disusun dengan baik dan dilaporkan tepat waktu kepada Mahkamah Agung R.I. Terima kasih.

Bandung, 14 Februari 2025



TENTANG

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Tanggal 11 Maret Tahun 1969 diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta, pada saat itu wilayah Jawa Barat masih meliputi Kawasan yang sekarang adalah provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, kemudian tanggal 6 Juli 2004 terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, dimana wilayah hukum Provinsi Jawa Barat tidak lagi meliputi Kawasan Provinsi Banten sekarang ini.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung saat ini meliputi 9 Kota dan 18 Kabupaten dan terbagi kedalam 23 Satuan Kerja Tingkat Pertama:

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Bandung
Klas IA Khusus | 13 | Pengadilan Negeri Cianjur
Klas IB |
| 2 | Pengadilan Negeri Bekasi
Klas IA Khusus | 14 | Pengadilan Negeri Ciamis
Klas IB |
| 3 | Pengadilan Negeri Bogor
Klas IA | 15 | Pengadilan Negeri Karawang
Klas IB |
| 4 | Pengadilan Negeri Depok
Klas IA | 16 | Pengadilan Negeri Sukabumi
Klas IB |
| 5 | Pengadilan Negeri Sumber
Klas IA | 17 | Pengadilan Negeri Cirebon
Klas IB |
| 6 | Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Klas IA | 18 | Pengadilan Negeri Indramayu
Klas IB |
| 7 | Pengadilan Negeri Cibinong
Klas IA | 19 | Pengadilan Negeri Cibadak
Klas IB |
| 8 | Pengadilan Negeri Bale
Bandung
Klas IA | 20 | Pengadilan Negeri Majalengka
Klas II |
| 9 | Pengadilan Negeri Garut
Klas IB | 21 | Pengadilan Negeri Kuningan
Klas II |
| 10 | Pengadilan Negeri Subang
Klas IB | 22 | Pengadilan Negeri Banjar
Klas II |
| 11 | Pengadilan Negeri Purwakarta
Klas IB | 23 | Pengadilan Negeri Cikarang
Klas II |
| 12 | Pengadilan Negeri Sumedang
Klas IB | | |

VISI

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. "

MISI

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

NILAI-NILAI UTAMA

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidak berpihakan dan
8. Perlakuan yang sama di depan hukum

PERISTIWA PENTING

2024

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Bandung, 15 Januari 2024, Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja serta Komitmen Bersama yang diikuti oleh Para Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Para Hakim Adhoc, Para Pejabat Strukturan dan Fungsional, Para Ketua Pengadilan Negeri Se Wilayah Jawa Barat dan seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi.



RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KPK

Bandung : Rapat Dengar Pendapat Terkait Program Pemberantasan Korupsi Dengan Jajaran Pengadilan Tinggi Bandung. Senin (29/1), bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung.

KUNJUNGAN KPT DKI JAKARTA

Bandung, 5 Februari 2024, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bandung menerima kunjungan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. beserta rombongan dalam rangka kegiatan studi banding.



SIDANG PLENO LAPORAN TAHUNAN 2023 PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BANDUNG – HUMAS: 6 Februari 2024 – Pengadilan Tinggi Bandung menggelar Sidang Pleno Laporan Tahunan 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik, acara dilangsungkan di Horison Ultima Hotel, dan dihadiri oleh Para Pejabat Forkopimda Jawa Barat, Dharmayukti Karini, Akademisi dan seluruh satuan kerja sewilayah Jawa Barat.



RAKERDA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Bandung, 8 Maret 2024 – Pengadilan Tinggi Bandung menggelar kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) yang dihadiri oleh seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

Kegiatan kali ini membahas kajian yang dihadapi dari segi perdata maupun kesekretariatan dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion). FGD ini terbagi menjadi 3 bentuk komisi yang masing-masing berupa Komisi I (Hakim Tinggi), Komisi II (Panitera), dan Komisi (Sekretaris).

PUBLIC CAMPAIGN TIM AREA V ZI PT BANDUNG DI STASIUN KAI BANDUNG

BANDUNG, 27 Maret 2024 : Kegiatan Public Campaign yang dilakukan adalah terkait pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung kepada para pencari keadilan yang sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Dalam menunjang kegiatan tersebut, Tim Area V Zona Integritas membagikan selebaran berupa pamphlet maupun stiker sebagai cinderamata kepada masyarakat.



ACARA BUKA BERSAMA DAN TARAWIH KELILING BERSAMA FORKOPIMDA WILAYAH JAWA BARAT

BANDUNG – 2 APRIL 2024 – Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bandung menggelar kegiatan Buka Bersama dan Tarawih Keliling bersama FORKOPIMDA Jawa Barat pada hari Senin Kemarin (1/4). Di sela-sela menunggu acara utama dimulai, pembagian sembako berupa beras dan uang THR diadakan kepada para pegawai honorer serta outsourcing di lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung.



WISUDA PURNA BAKTI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BANDUNG – 29 MEI 2024 – Selasa (28/5) kemarin, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bandung menggelar upacara wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H. yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung mulai pukul 09.30 WIB. Upacara purnabakti ini dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., MH beserta jajarannya, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan-perwakilan dari berbagai instansi lainnya di wilayah Jawa Barat.

ELAKSANAAN UJIAN HAKIM AD HOC UNTUK WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANDUNG.

BANDUNG – 30 MEI 2024 – Hari ini, Kamis (30/5) ujian calon Hakim Ad Hoc, peserta yang mengikuti ujian sebanyak 31 peserta, acara dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung.



PENGADILAN TINGGI BANDUNG MENERIMA KUNJUNGAN DARI PERWAKILAN MAHKAMAH AGUNG CHINA DI BANDUNG

BANDUNG – 16 Juni 2024 – Perwakilan Pengadilan Tinggi Bandung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menyambut kedatangan Rombongan Mahkamah Agung China di Bandung setelah sebelumnya berkunjung ke Kantor Pusat Mahkamah Agung RI di Jakarta untuk Kunjungan Kerja pada hari Kamis lalu (13/6). Adapun kedatangan rombongan Mahkamah Agung China ke Indonesia adalah untuk saling bertukar informasi mengenai HKI (Hukum Kekayaan Intelektual) serta hukum-hukum lain yang berkembang bagi kedua negara.



KUNJUNGAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG RI BESERTA ROMBONGAN DARI THE FEDERAL CIRCUIT AND FAMILY COURT OF AUSTRALIA (FCFCOA)

BANDUNG – 27 Juni 2024 – Pengadilan Tinggi Bandung mendapatkan kunjungan dari YM Bapak Syamsul Maarif, S.H, LL.M, Ph.D, dan YM Bapak Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., beserta Rombongan dari The Federal Circuit And Family Court Of Australia (FCFCOA).

KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK ENAM KETUA PENGADILAN TINGGI.

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik enam orang Ketua Pengadilan Tinggi pada Selasa, 2 Juli 2024 di ruang Kusumah Atmaja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.



PELAKSANAAN SIMULASI CAT NON ASN DARI INSTANSI MAHKAMAH AGUNG RI

BANDUNG - HUMAS: Sebanyak 258 peserta total keseluruhan 274 peserta mengikuti kegiatan Simulasi CAT Non ASN untuk instansi Mahkamah Agung RI di wilayah Jawa Barat pada hari ini, Selasa, 2 Juli 2024 di Kantor Regional III BKN Bandung.



STUDI ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAKUAN DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BANDUNG - HUMAS: Siang ini (8/7), sebanyak 37 mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Pakuan Bogor yang tergabung dalam UKM Debat Merah Putih mendatangi Pengadilan Tinggi Bandung setelah sebelumnya mengunjungi beberapa Pengadilan Negeri lainnya untuk kegiatan studi ilmiah.

ASSESSMENT AMPUH DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BANDUNG – 14 AGUSTUS 2024 – Sehari sebelumnya, Selasa (13/8) Pengadilan Tinggi Bandung menerima kunjungan dari tim penilai (assessor) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kunjungan kali ini adalah untuk menilai kinerja atau proses dari Pengadilan Tinggi Bandung melalui informasi dari aplikasi yang digunakan yakni AMPUH (sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH).



PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT RI DAN HUT MA RI KE-79 DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BANDUNG – 14 AGUSTUS 2024 – Pada hari ini, Rabu (14/8), Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bandung mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam rangka menyambut HUT RI dan HUT Mahkamah Agung RI ke-79. Kegiatan ini bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung dan dibuka oleh Bpk Dr. Lufsiana, SH., MH. beserta H. Baktar Jubri Nasution, S.H, M.H. selaku perwakilan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Cek kesehatan yang dikelola oleh RS TNI - AU Dr. M. Salamun ini terdiri atas cek kesehatan umum dan juga pemeriksaan mata.



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG MENGHADIRI FGD NASKAH PERADILAN PUNGLI BERSAMA SATGAS SABER PUNGLI JAWA BARAT

BANDUNG - 15 Agustus 2024 - Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Moh. Eka Kartika E.M., S.H., M.HUM diundang sebagai narasumber dalam kegiatan FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan Satgas Saber Pungli Jawa Barat dalam rangka membahas naskah akademik: "Membangun Peradilan Pungli".

KEGIATAN CHECK UP DAN DONOR DARAH DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BANDUNG – 16 AGUSTUS 2024 – Pengadilan Tinggi Bandung menggelar kegiatan check up dan donor darah pada hari ini, Jumat (16/8) di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung. Event check kesehatan dari Kimia Farma dan donor darah dari Palang Merah Indonesia (PMI) diadakan secara bersamaan mulai pukul 08.00 WIB serta diikuti oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Bandung termasuk satuan kerja Pengadilan Negeri di bawahnya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI RESMIKAN NAMA RUANG SIDANG PT BANDUNG BESERTA PERKENALAN APLIKASI E-CAKRA DAN SIWANI

BANDUNG - HUMAS (7/9) - Pada hari Jum'at (6/9), Pengadilan Tinggi Bandung menggelar kegiatan Peresmian Nama Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung beserta sosialisasi dua aplikasi yang tengah dikembangkan berupa E-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja) serta Siwani (Sistem Kepegawaian Mandiri).

Acara dilanjutkan dengan perkenalan atas dua inovasi terbaru Pengadilan Tinggi Bandung berupa aplikasi E-Cakra dan Siwani. Ketua Mahkamah Agung RI memberikan apresiasinya atas komitmen Pengadilan Tinggi Bandung dalam rangka melayani para pencari keadilan melalui dua inovasi yang sedang dikembangkan ini. Beliau berharap bahwa upaya ini dapat ditiru oleh pengadilan-pengadilan yang lainnya sebagai bukti nyata untuk mewujudkan keadilan melalui perkembangan teknologi.



TES EKSAMINASI CALON HAKIM TINGGI PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BANDUNG - HUMAS (16/10) Pengadilan Tinggi Bandung menyelenggarakan serangkaian atau tes pada kegiatan Eksaminasi Calon Hakim Tinggi Pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Para peserta terdiri atas Hakim Pengadilan Negeri yang berjumlahnya sebanyak 6 (enam) orang peserta.

**PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN
YTH BPK. WAYAN KARYA, S.H., M.HUM.
SEBAGAI WAKIL KETUA PENGADILAN
TINGGI BANDUNG**

BANDUNG - HUMAS: Jumat (25/10) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, YM Dr. Moh. Eka Kartika EM, S.H., M.Hum. mengambil sumpah dan melantik YM Wayan Kartika, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang baru. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung.



**KUNJUNGAN KERJA DELEGASI CINA,
THE HIGH PEOPLE'S COURT OF
ZHEJIANG PROVINCE PADA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

BANDUNG: HUMAS -- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung beserta jajarannya menyambut kedatangan delegasi dari The High People's Court of Zhejiang Province yang dipimpin Mr. Li Zhanguo dalam rangka kunjungan kerja pada hari Jumat, 29 November 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung. Pada kesempatan kali ini, kunjungan dari delegasi Pengadilan Tinggi Zhejiang tersebut diawali dengan sosialisasi beberapa program dan fasilitas yang tersebar di Pengadilan Tinggi Bandung seperti PTSP Mandiri, Digital Layanan (PTSP DILAN), dan penggunaan media berbasis internet di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Bandung untuk pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Selanjutnya, Baik Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bandung dan Delegasi Pengadilan Tinggi Zhejiang saling bertukar informasi dan ilmu seputar penanganan perkara yang dihadapi oleh kedua instansi di wilayahnya masing-masing.

ANUGRAH PENGHARGAAN

2024

1. Pengadilan Tinggi Bandung



1. SERTIFIKASI UNGGUL

Pengadilan Tinggi Bandung telah meraih sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan predikat :



2. SERTIFIKASI UNGGUL

Pengadilan Tinggi Bandung meraih nilai tertinggi dalam Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2024



2. Pengadilan Tinggi Bandung Bidang Keuangan

Kategori Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan Tahunan Yang Berkualitas TA 2023 dengan Jumlah 19 s/d 36 UAKPA



3. Penghargaan oleh Pengadilan Tinggi Kepada Pengadilan Negeri

A. Pemberian Penghargaan Nilai IKPA terbaik DIPA 01 dan 03 pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

- DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 - I. PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
 - II. PENGADILAN NEGERI KARAWANG
 - III. PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA



- DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM
 - I. PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
 - II. PENGADILAN NEGERI CIANJUR
 - III. PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU



B. Pemberian Penghargaan Evaluasi Implementasi SIPP Semester I Tahun 2024.

- I. PENGADILAN NEGERI BEKASI
- II. PENGADILAN NEGERI BANDUNG
- III. PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
- IV. PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
- V. PENGADILAN NEGERI CIANJUR
- VI. PENGADILAN NEGERI KARAWANG
- VII. PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
- VIII. PENGADILAN NEGERI CIAMIS



4. Penghargaan Se-Wilayah Jawa Barat

Table 1. Penghargaan Yang diperoleh Pengadilan Negeri se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung

NO	SATUAN KERJA	PENGHAARAGAN
1	PN Bale Bandung	Terbaik Ke V Evaluasi Implementasi SIPP Kategori perkara diatas 2000
2	PN Bandung	Peringkat Ke II Administrasi Perkada dan Keuangan perkara Tahun 2024
3	PN Banjar	Terbaik ke IV Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kelas II
4	PN Bekasi	Terbaik Ke IV Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus
5	PN Cibinong	Terbaik Ke IV Evaluasi Implementasi SIPP Kategori perkara diatas 2000

6	PN Cikarang	Terbaik ke VI Layanan Pengadilan/PTSP Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kelas II
7	PN Karawang	Peringkat Ke III Layanan Pengadilan / PTSP Kategori Terbaik Terbaik ke IV Evaluasi Implementasi SIPP Kategori Perkara 1001 s.d. 2000
8	PN Purwakarta	Terbaik ke IX Evaluasi Implementasi SIPP Kategori Perkara 501 s.d. 1000
9	PN Subang	Terbaik Ke IV Evaluasi Implementasi SIPP Kategori Perkara 501 s.d 1000
10	PN Tasikmalaya	Terbaik ke I Administrasi perkara dan keuangan perkara Pada Pengadilan Negeri Klas IA Terbaik ke 2 Evaluasi implementasi SIPP

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	i
TENTANG PENGADILAN	ii
VISI - MISI.....	iii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEBIJAKAN UMUM.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA, DAN CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	4
A. KEADAAN PERKARA.....	4
1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA	4
2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING.....	8
3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI	8
4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI	10
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	12
1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS	12
2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	13
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJAKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK. 15	
4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI	17
5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI	18
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	20
1. POSBAKUM.....	20
2. SIDANG KELILING/LAYANAN TERPADU	21
3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)	22
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	24
A. KOMPOSISI SDM	24
1. MUTASI PEGAWAI	38
2. PROMOSI PEGAWAI.....	43
3. PENSIUN	45
4. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis Yang telah mengikuti Diklat).....	46
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	47
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	47

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN	47
2. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	52
3. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).....	53
4. TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)	54
5. PENGELOLAAN PELAPORAN	56
6. PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR	56
7. PENGHARGAAN	57
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	57
1. Sarana Dan Prasarana Gedung	57
2. Rumah Dinas Tempat Tinggal Golongan.....	58
3. Kendaraan Dinas pada Pengadilan Bandung	59
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	60
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	64
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	64
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	65
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	69
BAB VI PENGAWASAN.....	92
A. INTERNAL	92
B. EVALUASI	93
BAB VII PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. REKOMENDASI	96

DAFTAR TABEL

Table 1. Penghargaan Pengadilan Negeri se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung	xiv
Table 2. Keadaan Perkara dan Penyelesaian Perkara Perdata	4
Table 3. Keadaan Perkara dan Penyelesaian Perkara Pidana	5
Table 4. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	8
Table 5. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
Table 6. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
Table 7. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	10
Table 8. Jumlah Sisa Perkara Tingkat Banding	12
Table 9. Jumlah Sisa Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diputus Tahun 2024	12
Table 10. Jumlah Sisa Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama	13
Table 11. Jumlah Perkara Tingkat Banding Yang Diputus Tepat Waktu.....	14
Table 12. Jumlah Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu	14
Table 13. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK15	
Table 14. Penyelesaian Perkara Di Tingkat Banding	17
Table 15. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi	17
Table 16. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	18
Table 17. Posbakum Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	20
Table 18. Sidang Keliling Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	21
Table 19. Ralisasi Anggaran dan Layanan Prodeo Pada Pengadilan Negeri se- Wilayah Jawa Barat	22
Table 20. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bandung.....	24
Table 21. Sumber Daya Manusia Pegawai Kontrak (PPNPN).....	28
Table 22. Data Pegawai Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	30
Table 23. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan (PNS) Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	31
Table 24. Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional (PPPK) Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung.....	33
Table 25. SDM Berdasarkan Kelompok Golongan.....	35
Table 26. SDM Berdasarkan Kelompok Pendidikan.....	36
Table 27. Kenaikan Pangkat, Promosi, Mutasi Dan Pensiun	37
Table 28. Matrik Mutasi Masuk Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024	38
Table 29. Matrik Mutasi Keluar Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024.....	42
Table 30. Matrik Promosi Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024.....	43
Table 31. Matrik Pensiun Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024	45
Table 32. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)	46
Table 33. Realisasi Anggaran Dipa 01 (BUA) dan Dipa 03 (BADILUM).....	47
Table 34. Pagu Aawal dan Pagu Akhir Dipa 01 (BUA)	48
Table 35. Pagu Awal dan Pagu Kahir DIPA 03 (Badilum).....	48
Table 36. Detil Realisasi DIPA 01 (BUA)	49
Table 37. Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung.....	50
Table 38. LRA DIPA 01 TA 2024 Se Wilayah Jawa Barat.....	51
Table 39. LRA DIPA 01 TA 2024 Se Wilayah Jawa Barat.....	51

Table 40. Oengelolaan Barang Milik Negara.....	52
Table 41. PNBP Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung.....	54
Table 42. Tunjangan Kinerja Pegawai (remunerasi).....	55
Table 43. Rekapitulasi Transport Hakim	56
Table 44. Penghargaan Bagian Keuangan TA 2024.....	57
Table 45. Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Bandung.....	58
Table 46. Daftar Kendaan Dinas Pengadilan Tinggi Bandung	59
Table 47. Daftar Rincian Jumlah Perkara E-Court.....	61
Table 48. Perangkat Server.....	62
Table 49. Penilaian Implementasi SIPP	63
Table 50. Daftar Penilaian AMPUH Se- Wilayah Jawa Barat.....	65
Table 51. Daftar Layanan Inovasi.	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri	3



BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk mewujudkan *good governance* dan *accountability* merupakan suatu keniscayaan, sebab laporan ini diharapkan terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan untuk Tahun 2024 dilaksanakan oleh seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari lembaga Mahkamah Agung tidak terkecuali Pengadilan Bandung. Adapun Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Bandung ini merujuk pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Bandung ini terdiri dari tujuh Bab meliputi, Bab I Pendahuluan, Bab II huruf A memuat Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Bandung, huruf B. Penyelesaian Perkara, huruf C. Program Prioritas Nasional. Bab III Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bandung, Bab IV. Memuat Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi. Sedangkan Bab V Peningkatan Pelayanan Publik, Bab VI memuat Pengawasan. Bab terakhir yaitu Bab VII memuat Penutup.

Pengadilan Tinggi Bandung sebagai kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan baik internal maupun eksternal. Pembinaan dan pengawasan eksternal dilakukan terhadap 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Bandung juga mengambil langkah-langkah kebijakan strategis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian perkara pada tingkat banding, dalam rangka tercapainya penyelesaian putusan yang tepat waktu baik untuk Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara TIPIKOR.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara rutin dengan tujuan memastikan proses layanan, administrasi dan persidangan telah sesuai

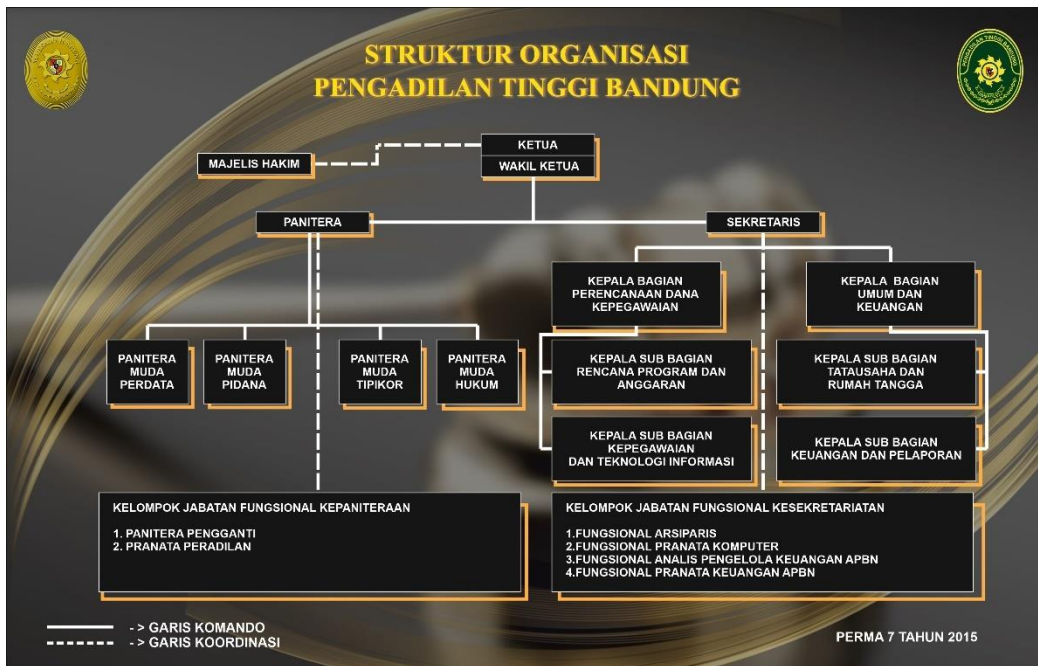
dengan ketenuan yang berlaku guna peningkatan kualitas putusan ditingkat banding sehingga meningkatkan kepuasan yang berkadilil bagi masyarakat sehingga persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi meningkat.

3. Memastikan layanan-layanan kepada para masyarakat secara optimal dan prima sesuai dengan standar pelayanan yang telah diteapkan sehingga index prsepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan meningkat.
4. Melakuka kerjasama dan peningkatan kualitas layanan pengiriman guna menunjang pelaksanaan pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
5. Melakukan pengawasan daerah secara rutin baik melalui Pusat Kendali secara Daring dan juga pelaksanaan secara langsung di Pengadilan Negeri setempat, guna memastikan pelaksanana tugas pokok dan fungsi pengadilan berjalan secara prima dan optimal.
6. Mewujudkan keterbukaan informasi melalui pemanfaatan sistem informasi sehingga dapat diakses dengan mudah.
7. Pelaksanaan dan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) telah sesuai dengan peraturan dan dasar hukum terbaru.

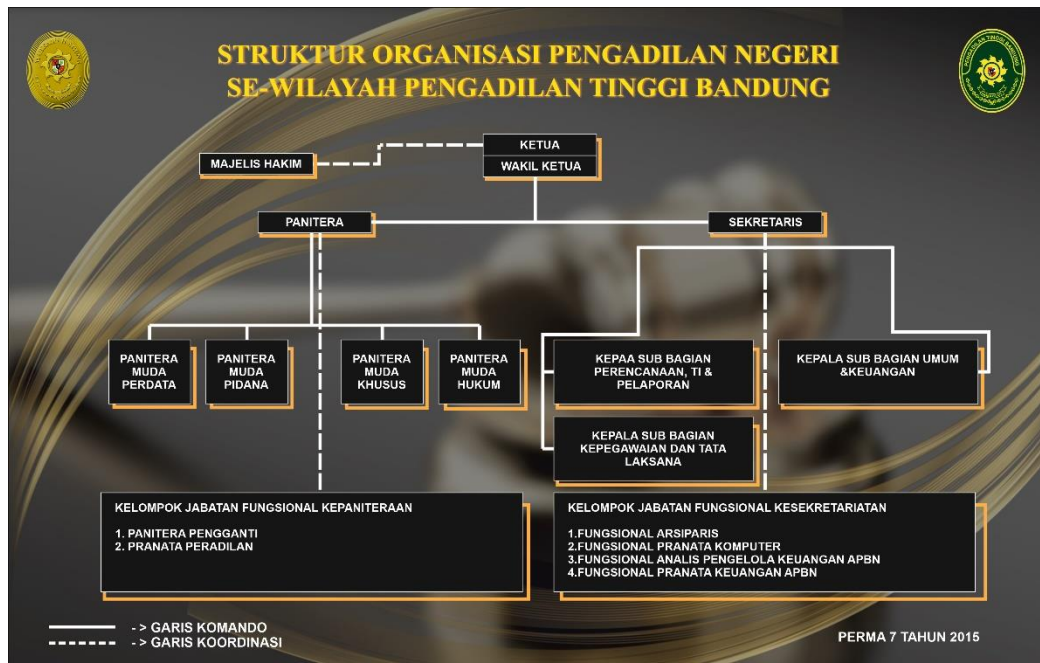
Sebagai upaya peningkatan kulitas pelayanan dan tertib adminstrasi, pengadilan tinggi bandung dan pengadilan negeri se-wilayah hukum pengadilan tinggi bandung telah melaksanakan Zona Integritas serta telah menerima Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh.

B. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri



BAB II

A. KEADAAN PERKARA

- **Keadaan Perkara Tingkat Pertama.**
- **Keadaan Perkara Tingkat Banding.**
- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.**
- **Keadaan Perkara Tingkat PK.**

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA, DAN CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

A. KEADAAN PERKARA.

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA.

Berikut data terperinci keadaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Bandung.

Table 2. Keadaan Perkara dan Penyelesaian Perkara Perdata

Jenis Perkara	PN Bale Bandung	PN Bandung	PN Banjar	PN Bekasi	PN Bogor	PN Ciamis	PN Cianjur	PN Cibadak	PN Cibinong	PN Cikarang	PN Cirebon	PN Depok	PN Garut	PN Indramayu	PN Karawang	PN Kuningan	PN Majalengka	PN Purwakarta	PN Subang	PN Sukabumi	PN Sumber	PN Sumedang	PN Tasikmalaya
Perdata Gugatan																							
a. Sisa Tahun 2023	120	265	4	237	79	17	23	12	224	129	36	134	19	27	50	2	8	18	13	13	35	6	30
b. Masuk	322	588	4	640	225	24	54	48	522	310	82	415	38	75	166	20	17	61	56	43	85	55	72
c. Cabut	30	135	3	95	20	0	6	5	101	243	6	77	2	13	19	3	1	11	9	2	10	13	12
d. Putus	320	468	5	647	224	28	55	36	423	54	92	298	43	77	145	11	19	58	46	36	73	43	72
e. Sisa Tahun 2024	122	250	0	230	60	13	22	18	222	142	28	174	12	25	52	8	5	21	14	17	37	18	30
Perdata Permohonan																							
a. Sisa Tahun 2023	13	37	0	237	10	1	4	2	24	30	3	1	6	9	11	1	4	1	5	2	2	1	2
b. Masuk	587	1,022	29	661	284	126	208	54	838	487	142	704	233	162	471	68	124	435	135	78	99	96	211
c. Cabut	23	193	0	64	13	0	8	12	65	43	12	56	30	11	14	11	1	3	6	0	9	1	11
d. Putus	573	832	29	587	264	126	208	43	778	446	130	649	205	171	458	58	125	436	134	78	86	94	208
e. Sisa Tahun 2024	27	34	0	31	17	0	4	1	19	28	3	0	4	0	10	0	2	0	0	2	6	3	5
Gugatan Sederhana																							
a. Sisa Tahun 2023	4	6	0	0	1	0	0	9	5	3	0	0	8	3	0	0	0	2	5	0	4	1	1
b. Masuk	135	208	21	66	31	76	20	45	60	74	13	48	91	83	85	20	48	28	39	11	55	38	78
c. Cabut	31	20	3	-	2	0	2	14	19	51	4	16	19	12	25	11	4	9	7	0	24	0	16
d. Putus	129	187	18	62	27	72	20	38	42	23	5	31	77	74	51	8	42	29	36	11	33	38	78
e. Sisa Tahun 2024	10	7	0	0	3	4	0	2	4	3	4	1	3	3	9	1	2	0	1	0	2	1	1
Perlawanan (Derden Verzet)																							
a. Sisa Tahun 2023	9	23	0	6	5	1	1	2	11	2	3	5	0	3	2	0	0	0	2	0	1	0	1
b. Masuk	17	31	0	102	17	5	0	1	13	2	6	17	0	9	0	0	0	0	4	0	4	0	7
c. Cabut	3	9	0	-	2	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-	0	0
d. Putus	10	27	0	13	13	3	1	2	12	2	4	8	0	3	2	0	0	0	2	0	4	0	5
e. Sisa Tahun 2024	9	18	0	89	9	2	0	1	9	2	4	14	0	6	0	0	0	0	4	0	1	0	3
PHI																							
a. Sisa Tahun 2023	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Masuk	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Cabut	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Putus	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Sisa Tahun 2024	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

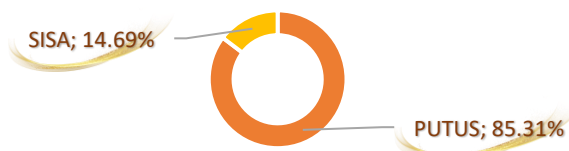
Table 3. Keadaan Perkara dan Penyelesaian Perkara Pidana

Jenis Perkara	PN Bale Bandung	PN Bandung	PN Banjar	PN Bekasi	PN Bogor	PN Ciamis	PN Cianjur	PN Cibadak	PN Cibinong	PN Cikarang	PN Cirebon	PN Depok	PN Garut	PN Indramayu	PN Karawang	PN Kuningan	PN Majalengka	PN Purwakarta	PN Subang	PN Sukabumi	PN Sumber	PN Sumedang	PN Tasikmalaya
Pidana Biasa																							
a. Sisa Tahun 2023	199	213	4	133	56	55	69	36	162	122	23	95	73	100	65	16	18	58	33	46	74	37	48
b. Masuk	1,152	1,100	63	672	421	260	466	383	752	495	115	569	454	383	352	154	178	200	258	198	378	212	372
c. Cabut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Putus	1,136	1,137	60	675	419	296	452	354	774	346	112	577	469	435	354	160	179	234	255	218	406	228	383
e. Sisa Tahun 2024	215	176	7	130	58	19	83	29	140	114	26	87	58	48	63	10	17	24	36	26	46	21	37
Pidana Singkat																							
a. Sisa Tahun 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Masuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
c. Cabut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Putus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
e. Sisa Tahun 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat																							
a. Sisa Tahun 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Masuk	66	37	8	58	35	17	23	2	218	6	13	2	31	7	5	9	3	17	10	3	53	3	6
c. Cabut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Putus	66	37	8	58	35	17	23	2	218	6	13	2	31	7	5	9	3	17	10	3	53	3	6
e. Sisa Tahun 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelanggaran Lalu Lintas																							
a. Sisa Tahun 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Masuk	36,283	37,040	2,607	562	7	12,345	7,612	4,597	11,986	7,099	2,714	7,373	12,163	7,085	7,083	2,792	5,551	8,275	7,547	1,920	7,819	9,135	13,952
c. Cabut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Putus	36,283	37,040	2,607	562	7	12,345	7,612	4,597	11,986	7,099	2,714	7,373	12,163	7,085	7,083	2,792	5,551	8,275	7,547	1,920	7,819	9,135	13,952
e. Sisa Tahun 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pra Peradilan																							
a. Sisa Tahun 2023	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Masuk	8	26	0	10	8	5	3	9	14	10	0	7	1	6	7	0	2	3	1	0	4	1	6
c. Cabut	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Putus	9	25	0	11	8	6	3	4	11	9	0	7	1	6	6	0	2	3	1	0	4	1	5
e. Sisa Tahun 2024	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pidana Anak																							
a. Sisa Tahun 2023	2	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	3	0	0
b. Masuk	31	14	4	26	11	15	15	27	20	28	8	20	12	59	8	14	11	7	18	12	52	6	8
c. Cabut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Putus	32	14	4	28	11	14	15	28	21	28	7	20	12	58	9	13	11	7	18	13	54	6	7
e. Sisa Tahun 2024	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Tipikor																							
a. Sisa Tahun 2023	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Masuk	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Cabut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Putus	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Sisa Tahun 2024	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

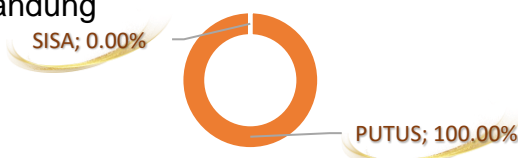
Persentase penanganan perkara seluruh pengadilan negeri se-wilayah pengadilan tinggi bandung.

PERKARA PIDANA

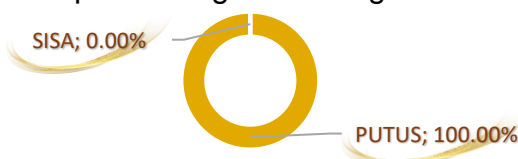
1. Keadaan Perkara **Pidana Biasa** dan **Pidana Khusus** Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
Jumlah Perkara = 11,322perkara
Putus = 9,659perkara
Persentase Penyelesaian: **85.31%**



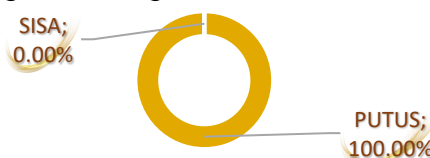
2. Keadaan Perkara **Pidana Singkat** Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
Jumlah Perkara = 9 perkara
Putus = 9 perkara
Persentase Penyelesaian: **100%**



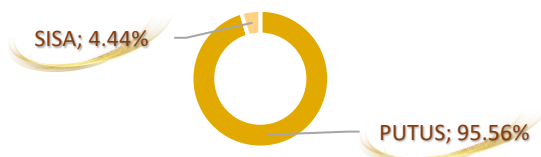
3. Keadaan Perkara **Pidana Cepat** Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
Jumlah Perkara = 632 perkara
Putus = 632 perkara
Persentase Penyelesaian: **100%**



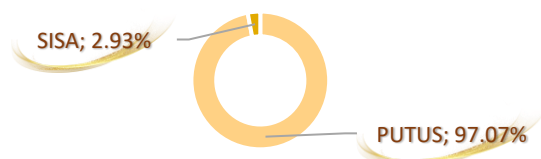
4. Keadaan Perkara **Pelanggaran Lalu Lintas** Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
Jumlah Perkara = 213,547 perkara
Putus = 213,547 perkara
Persentase Penyelesaian: **100%**



5. Keadaan Perkara **Pra Peradilan** Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
Jumlah Perkara = 131 perkara
Putus = 122 perkara
Persentase Penyelesaian: **95.56%**



6. Keadaan Perkara **Pidana Anak** Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
Jumlah Perkara = 443 perkara
Putus = 430 perkara
Persentase Penyelesaian: **97.07%**

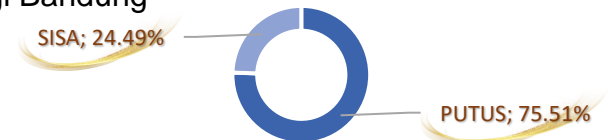


7. Keadaan Perkara **Tipikor** Tahun 2024 pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama
 Jumlah Perkara = 142 perkara
 Putus = 98 perkara
 Persentase Penyelesaian: **69.01%**

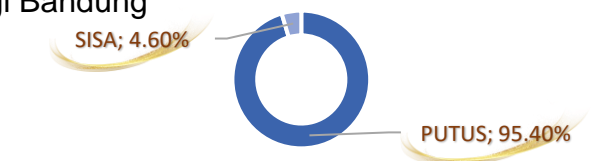


PERKARA PERDATA

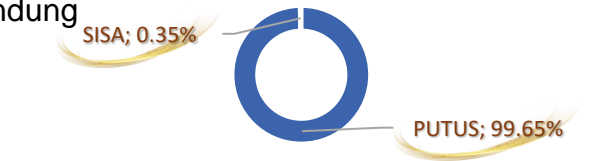
1. Keadaan Perkara **Perdata Gugatan** Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
 Jumlah Perkara = 5,415 perkara
 Putus = 4,089 perkara
 Persentase Penyelesaian: **75.51%**



2. Keadaan Perkara **Perdata Permohonan** Tahun 2024 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
 Jumlah Perkara = 7,656 perkara
 Putus = 7,304 perkara
 Persentase Penyelesaian: **95,40%**



3. Keadaan Perkara **Gugatan Sederhana** Tahun 2024 Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi Bandung
 Jumlah Perkara = 1425 perkara
 Putus = 1420 perkara
 Persentase Penyelesaian: **99,65%**



4. Keadaan Perkara **Perlawanan (Derden Verzet)** Tahun 2024 Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi Bandung
 Jumlah Perkara = 312 perkara
 Putus = 131 perkara
 Persentase Penyelesaian: **41.99%**



5. Keadaan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan PHI Bandung
 Jumlah Perkara = 314 perkara
 Putus = 242 perkara
 Persentase Penyelesaian: **77,07%**



2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING.

Berikut ini rincian keadaan perkara tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024

Table 4. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

JENIS PERKARA	BEBAN PERKARA TK PERTAMA SE- JAWA BARAT	PERKARA PUTUS TK PERTAMA SE-JAWA BARAT
Perdata	5415	4089
Pidana Biasa	11322	9659
Pidana Anak	443	430
Tipikor	142	98
Jumlah	17322	14276

Table 5. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2024	Sisa Tahun 2024	% Putus
Perdata	75	847	922	0	825	97	89.48%
Pidana Biasa	54	467	521	0	474	47	90.98%
Pidana Anak	2	51	53	0	51	2	96.23%
Tipikor	3	42	45	0	38	7	84.44%
Jumlah	134	1407	1541	0	1388	153	90.07%

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.

Berikut ini rincian keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024.

Table 6. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi Di Tahun 2024	Jumlah Perkara Kasasi Yang Putus Di Tahun 2024
1	PN Bale Bandung	Pidana	18	18
		Perdata	41	38
2	PN Bandung	Pidana	61	66
		Perdata	228	97
3	PN Banjar	Pidana	4	1
		Perdata	2	0
4	PN Bekasi	Pidana	25	10
		Perdata	70	67
5	PN Bogor	Pidana	53	24
		Perdata	54	50

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi Di Tahun 2024	Jumlah Perkara Kasasi Yang Putus Di Tahun 2024
6	PN Ciamis	Pidana	4	1
		Perdata	2	0
7	PN Cianjur	Pidana	5	4
		Perdata	7	13
8	PN Cibadak	Pidana	5	2
		Perdata	8	5
9	PN Cibinong	Pidana	26	24
		Perdata	60	32
10	PN Cikarang	Pidana	36	32
		Perdata	35	30
11	PN Cirebon	Pidana	7	4
		Perdata	7	4
12	PN Depok	Pidana	30	33
		Perdata	50	14
13	PN Garut	Pidana	14	11
		Perdata	7	0
14	PN Indramayu	Pidana	2	2
		Perdata	15	2
15	PN Karawang	Pidana	12	11
		Perdata	20	23
16	PN Kuningan	Pidana	4	3
		Perdata	5	2
17	PN Majalengka	Pidana	0	0
		Perdata	3	3
18	PN Purwakarta	Pidana	2	2
		Perdata	9	6
19	PN Subang	Pidana	16	12
		Perdata	7	10
20	PN Sukabumi	Pidana	22	14
		Perdata	2	3
21	PN Sumber	Pidana	24	19
		Perdata	15	12
22	PN Sumedang	Pidana	13	9
		Perdata	1	2
23	PN Tasikmalaya	Pidana	12	10
		Perdata	22	4

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI.

Berikut ini rincian keadaan perkara Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024.

Table 7. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Di Tahun 2024	Jumlah Perkara Peninjauan Kembali (PK) Yang Putus Di Tahun 2024
1	PN Bale Bandung	Pidana	3	5
		Perdata	13	12
2	PN Bandung	Pidana	28	15
		Perdata	19	4
3	PN Banjar	Pidana	1	0
		Perdata	1	0
4	PN Bekasi	Pidana	17	14
		Perdata	25	14
5	PN Bogor	Pidana	1	0
		Perdata	10	10
6	PN Ciamis	Pidana	0	0
		Perdata	0	0
7	PN Cianjur	Pidana	0	0
		Perdata	3	1
8	PN Cibadak	Pidana	1	1
		Perdata	0	1
9	PN Cibinong	Pidana	1	0
		Perdata	19	14
10	PN Cikarang	Pidana	4	4
		Perdata	11	7
11	PN Cirebon	Pidana	3	3
		Perdata	6	4
12	PN Depok	Pidana	3	1
		Perdata	9	2
13	PN Garut	Pidana	0	0
		Perdata	0	0
14	PN Indramayu	Pidana	1	1
		Perdata	0	0
15	PN Karawang	Pidana	2	1
		Perdata	1	3
16	PN Kuningan	Pidana	1	1
		Perdata	1	2
17	PN Majalengka	Pidana	0	0
		Perdata	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Di Tahun 2024	Jumlah Perkara Peninjauan Kembali (PK) Yang Putus Di Tahun 2024
18	PN Purwakarta	Pidana	1	1
		Perdata	5	3
19	PN Subang	Pidana	0	0
		Perdata	1	0
20	PN Sukabumi	Pidana	0	0
		Perdata	0	0
21	PN Sumber	Pidana	1	1
		Perdata	3	5
22	PN Sumedang	Pidana	0	0
		Perdata	2	1
23	PN Tasikmalaya	Pidana	3	0
		Perdata	4	0

BAB II

B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.**
- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.**
- **Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.**
- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi.**
- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi**

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini Jumlah sisa perkara pada Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2023 yang diputus tahun 2024.

Table 8. Jumlah Sisa Perkara Tingkat Banding Yang Diputus Paa Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara TH. 2023 Yang Diputus TH. 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
Perdata	75	75	100.00%
Pidana Biasa	54	54	100.00%
Pidana Anak	2	2	100.00%
Tipikor	3	3	100.00%
Jumlah	134	134	100.00%

Table 9. Jumlah Sisa Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diputus Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Pidana			Pidana Khusus		
		Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	PN Bale Bandung	203	203	100%	0	0	100%
2	PN Bandung	213	213	100%	30	30	100%
3	PN Banjar	4	4	100%	0	0	100%
4	PN Bekasi	69	69	100%	64	64	100%
5	PN Bogor	56	56	100%	56	56	100%
6	PN Ciamis	56	56	100%	0	0	100%
7	PN Cianjur	69	69	100%	0	0	100%
8	PN Cibadak	36	36	100%	0	0	100%
9	PN Cibinong	140	140	100%	0	0	100%
10	PN Cikarang	122	122	100%	0	0	100%
11	PN Cirebon	23	23	100%	0	0	100%
12	PN Depok	95	95	100%	0	0	100%
13	PN Garut	73	73	100%	0	0	100%
14	PN Indramayu	100	100	100%	4	4	100%
15	PN Karawang	65	65	100%	1	1	100%
16	PN Kuningan	16	16	100%	0	0	100%
17	PN Majalengka	18	18	100%	0	0	100%
18	PN Purwakarta	58	58	100%	0	0	100%
19	PN Subang	33	33	100%	0	0	100%
20	PN Sukabumi	46	46	100%	0	0	100%
21	PN Sumber	77	77	100%	0	0	100%
22	PN Sumedang	37	37	100%	0	0	100%
23	PN Tasikmalaya	48	48	100%	0	0	100%
Jumlah		1657	1657		155	155	

Table 10. Jumlah Sisa Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama Yang Diputus Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Perdata			Perdata Khusus		
		Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	Sisa Perkara Th. 2023	Sisa Perkara Th. 2023 yang diselesaikan tahun 2024	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	PN Bale Bandung	147	147	100%	0	0	100%
2	PN Bandung	308	308	100%	70	70	100%
3	PN Banjar	4	4	100%	0	0	100%
4	PN Bekasi	237	237	100%	0	0	100%
5	PN Bogor	86	86	100%	0	0	100%
6	PN Ciamis	18	18	100%	0	0	100%
7	PN Cianjur	28	28	100%	0	0	100%
8	PN Cibadak	25	25	100%	0	0	100%
9	PN Cibinong	264	262	99,24%	0	0	100%
10	PN Cikarang	164	158	96,34%	0	0	100%
11	PN Cirebon	42	42	100%	0	0	100%
12	PN Depok	140	134	96%	0	0	100%
13	PN Garut	33	30	90,90%	0	0	100%
14	PN Indramayu	39	39	100%	0	0	100%
15	PN Karawang	61	61	100%	0	0	100%
16	PN Kuningan	3	3	100%	0	0	100%
17	PN Majalengka	12	12	100%	0	0	100%
18	PN Purwakarta	21	21	100%	0	0	100%
19	PN Subang	30	30	100%	0	0	100%
20	PN Sukabumi	13	13	100%	0	0	100%
21	PN Sumber	42	42	100%	0	0	100%
22	PN Sumedang	8	8	100%	0	0	100%
23	PN Tasikmalaya	34	34	100%	0	0	100%
Jumlah		1759	1742		70	70	

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, batas penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding dan maksimal 5 bulan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama. Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2024.

Table 11. Jumlah Perkara Tingkat Banding Yang Diputus Tepat Waktu

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Th. 2024	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
Perdata	825	825	0	100.00%
Pidana Biasa	474	474	0	100.00%
Pidana Anak	51	51	0	100.00%
Tipikor	38	38	0	100.00%
Jumlah	1388	1388	0	100.00%

Table 12. Jumlah Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
1	PN Bale Bandung	Pidana	1136	1136	0	100.00%
		Perdata	1022	1020	2	99.80%
2	PN Bandung	Pidana	1235	1235	0	100.00%
		Perdata	1708	1681	27	98.42%
3	PN Banjar	Pidana	56	56	7	100.00%
		Perdata	3	3	0	100.00%
4	PN Bekasi	Pidana	672	668	4	99.40%
		Perdata	1296	1009	62	77.85%
5	PN Bogor	Pidana	419	419	0	100.00%
		Perdata	259	172	87	66.41%
6	PN Ciamis	Pidana	296	296	0	100.00%
		Perdata	28	28	0	100.00%
7	PN Cianjur	Pidana	466	466	0	100.00%
		Perdata	278	233	25	83.81%
8	PN Cibadak	Pidana	318	318	0	100.00%
		Perdata	148	144	4	97.30%
9	PN Cibinong	Pidana	774	772	2	99.74%
		Perdata	1.255	1.172	83	93.39%
10	PN Cikarang	Pidana	511	509	2	99.61%
		Perdata	862	655	187	75.99%
11	PN Cirebon	Pidana	112	112	0	100.00%
		Perdata	247	212	35	85.83%
12	PN Depok	Pidana	577	577	0	100.00%
		Perdata	1135	965	170	85,02%

13	PN Garut	Pidana	396	396	0	100.00%
		Perdata	299	299	0	100.00%
14	PN Indramayu	Pidana	497	497	0	100.00%
		Perdata	322	322	0	100.00%
15	PN Karawang	Pidana	354	354	0	100.00%
		Perdata	712	697	15	97.89%
16	PN Kuningan	Pidana	160	160	0	100.00%
		Perdata	102	102	0	100.00%
17	PN Majalengka	Pidana	195	195	0	100.00%
		Perdata	192	192	0	100.00%
18	PN Purwakarta	Pidana	241	239	2	99.17%
		Perdata	525	525	0	100.00%
19	PN Subang	Pidana	284	284	0	100.00%
		Perdata	245	245	0	100.00%
20	PN Sukabumi	Pidana	231	231	0	100.00%
		Perdata	38	31	7	81.58%
21	PN Sumber	Pidana	406	406	0	100.00%
		Perdata	239	239	0	100.00%
22	PN Sumedang	Pidana	234	234	0	100.00%
		Perdata	175	172	0	98.29%
23	PN Tasikmalaya	Pidana	401	401	0	100.00%
		Perdata	362	362	0	100.00%

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut rincian jumlah perkara di tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024 yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Table 13. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	
1	PN Bale Bandung	Pidana	1136	1112	97.89%	1118	98.42%	1133	99.74%
		Perdata	320	268	83.75%	279	87.19%	307	95.94%
2	PN Bandung	Pidana	1235	1133	91.74%	1116	90.36%	1228	99.43%
		Perdata	689	322	46.73%	482	69.96%	449	65.17%
3	PN Banjar	Pidana	60	54	90.00%	56	93.33%	59	98.33%
		Perdata	4	0	0.00%	2	50.00%	1	25.00%
4	PN Bekasi	Pidana	675	640	94.81%	650	96.30%	675	100.00%

No	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara PN Yang Putus Th. 2023 Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK			
		Perdata	1296	1159	89.43%	1226	94.60%	1271	98.07%
5	PN Bogor	Pidana	419	366	87.35%	366	87.35%	419	100.00%
		Perdata	259	199	76.83%	213	82.24%	259	100.00%
6	PN Ciamis	Pidana	296	290	97.97%	292	98.65%	296	100.00%
		Perdata	28	25	89.29%	26	92.86%	28	100.00%
7	PN Cianjur	Pidana	466	455	97.64%	461	98.93%	450	96.57%
		Perdata	283	265	93.64%	276	97.53%	280	98.94%
8	PN Cibadak	Pidana	354	339	95.76%	349	98.59%	353	99.72%
		Perdata	148	130	87.84%	133	89.86%	139	93.92%
9	PN Cibinong	Pidana	774	740	95.61%	770	99.48%	774	100.00%
		Perdata	524	437	83.40%	24	4.58%	523	99.81%
10	PN Cikarang	Pidana	511	466	91.19%	474	92.76%	507	99.22%
		Perdata	862	804	93.27%	827	95.94%	861	99.88%
11	PN Cirebon	Pidana	112	103	91.96%	105	93.75%	112	100.00%
		Perdata	96	80	83.33%	9	9.38%	3	3.13%
12	PN Depok	Pidana	577	540	93.59%	547	94.80%	576	99.83%
		Perdata	1135	1063	93.66%	1038	91.45%	1126	99.21%
13	PN Garut	Pidana	469	457	97.44%	455	97.01%	469	100.00%
		Perdata	371	364	98.11%	365	98.38%	370	99.73%
14	PN Indramayu	Pidana	497	481	96.78%	495	99.60%	496	99.80%
		Perdata	322	302	93.79%	305	94.72%	322	100.00%
15	PN Karawang	Pidana	354	336	94.92%	344	97.18%	354	100.00%
		Perdata	712	685	96.21%	709	99.58%	712	100.00%
16	PN Kuningan	Pidana	160	154	96.25%	156	97.50%	159	99.38%
		Perdata	14	11	78.57%	9	64.29%	14	100.00%
17	PN Majalengka	Pidana	195	186	95.38%	195	100.00%	195	100.00%
		Perdata	192	191	99.48%	192	100.00%	192	100.00%
18	PN Purwakarta	Pidana	241	222	92.12%	238	98.76%	241	100.00%
		Perdata	525	515	98.10%	516	98.29%	520	99.05%
19	PN Subang	Pidana	284	260	91.55%	270	95.07%	284	100.00%
		Perdata	245	43	17.55%	143	58.37%	55	22.45%
20	PN Sukabumi	Pidana	231	207	89.61%	209	90.48%	231	100.00%
		Perdata	128	124	96.88%	127	99.22%	128	100.00%
21	PN Sumber	Pidana	406	421	103.69%	480	118.23%	479	117.98%
		Perdata	239	217	90.79%	224	93.72%	237	99.16%
22	PN Sumedang	Pidana	234	214	91.45%	221	94.44%	234	100.00%
		Perdata	175	171	97.71%	174	99.43%	175	100.00%
23	PN Tasikmalaya	Pidana	401	372	92.77%	389	97.01%	398	99.25%
		Perdata	370	348	94.05%	5	1.35%	370	100.00%

Jumlah keseluruhan perkara putus pada tahun 2024 sebanyak 19.024 perkara dan perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 1.753 perkara artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung sangat tinggi yaitu sebesar 90.79% yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Table 14. Penyelesaian Perkara Di Tingkat Banding

UMLAH PERKARA BANDING	KASASI	TIDAK KASASI	PROSES PEMBERITAHUAN PUTUSAN
1388	833 (60.01%)	471 (33.93%)	84

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Berikut ini jumlah perkara perdata tahun 2024 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024 yang berhasil mediasi.

Table 15. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	PN Bale Bandung	188	18	167	3	7
2	PN Bandung	394	35	337	22	35
3	PN Banjar	4	0	3	1	0

4	PN Bekasi	735	22	321	392	7
5	PN Bogor	143	16	125	2	8
6	PN Ciamis	21	2	19	0	
7	PN Cianjur	33	4	29	0	2
8	PN Cibadak	24	1	23	0	2
9	PN Cibinong	294	46	248	0	25
10	PN Cikarang	159	19	129	11	14
11	PN Cirebon	49	4	43	2	1
12	PN Depok	250	17	225	8	25
13	PN Garut	26	5	21	0	2
14	PN Indramayu	70	3	67	0	4
15	PN Karawang	106	11	94	1	6
16	PN Kuningan	11	1	10	0	6
17	PN Majalengka	11	2	9	0	1
18	PN Purwakarta	41	7	34	0	3
19	PN Subang	32	3	25	4	3
20	PN Sukabumi	33	6	26	1	1
21	PN Sumber	67	2	63	2	4
22	PN Sumedang	33	5	27	1	0
23	PN Tasikmalaya	79	7	52	20	0
Jumlah		2803	236	2097	469	156

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA"). Berikut ini jumlah perkara pidana anak tahun 2024 Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024 yang berhasil melakukan diversifikasi.

Table 16. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak Th. 2024	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diversi Th. 2024	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	PN Bale Bandung	32	30	2	28	0	0
2	PN Bandung	0	0	0	0	0	0
3	PN Banjar	4	1	0	1	0	0
4	PN Bekasi	26	9	6	3	17	0
5	PN Bogor	11	0	0	0	0	0
6	PN Ciamis	15	1	0	1	14	0

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak Th. 2024	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diversi Th. 2024	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
7	PN Cianjur	15	8	0	0	0	0
8	PN Cibadak	27	15	8	7	12	0
9	PN Cibinong	20	5	1	4	0	0
10	PN Cikarang	28	3	0	3	0	0
11	PN Cirebon	8	0	0	0	0	0
12	PN Depok	20	7	3	3	1	0
13	PN Garut	10	10	9	1	0	0
14	PN Indramayu	59	12	6	6	0	0
15	PN Karawang	8	0	0	0	0	0
16	PN Kuningan	14	14	0	14	0	0
17	PN Majalengka	11	10	10	0	0	0
18	PN Purwakarta	7	1	0	1	0	0
19	PN Subang	18	0	0	0	0	0
20	PN Sukabumi	12	5	5	0	7	0
21	PN Sumber	0	0	0	0	0	0
22	PN Sumedang	6	0	0	6	0	0
23	PN Tasikmalaya	8	2	0	2	0	0
Jumlah		359	133	50	80	51	0



BAB II

C. PROGRAM PRIORITAS

- **Posbakum.**
- **Sidang Keleiling.**
- **Perkara Prodeo.**

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. POSBAKUM

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun pada tahun 2024. Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun pada tahun 2024.

Table 17. Posbakum Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

No.	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp.)	Realisasi Anggaran Posbakum (Rp.)	(%)	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (orang)
1	PN Bale Bandung	Rp44,000,000	Rp44,000,000	100.00%	618
2	PN Bandung	Rp84,000,000	Rp84,000,000	100.00%	2777
3	PN Banjar	Rp28,000,000	Rp28,000,000	100.00%	61
4	PN Bekasi	Rp44,000,000	Rp44,000,000	100.00%	1041
5	PN Bogor	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	372
6	PN Ciamis	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	82
7	PN Cianjur	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	0
8	PN Cibadak	Rp28,000,000	Rp28,000,000	100.00%	0
9	PN Cibinong	Rp44,000,000	Rp44,000,000	100.00%	0
10	PN Cikarang	Rp44,000,000	Rp44,000,000	100.00%	484
11	PN Cirebon	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	0
12	PN Depok	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	370
13	PN Garut	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	0
14	PN Indramayu	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	0
15	PN Karawang	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	401

16	PN Kuningan	Rp28,000,000	Rp28,000,000	100.00%	65
17	PN Majalengka	Rp28,000,000	Rp28,000,000	100.00%	83
18	PN Purwakarta	Rp44,000,000	Rp44,000,000	100.00%	248
19	PN Subang	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	108
20	PN Sukabumi	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	69
21	PN Sumber	Rp24,000,000	Rp24,000,000	100.00%	114
22	PN Sumedang	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	98
23	PN Tasikmalaya	Rp36,000,000	Rp36,000,000	100.00%	102
Jumlah		Rp872,000,000	Rp872,000,000		7093

2. SIDANG KELILING/LAYANAN TERPADU

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut digalakkan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Berikut data layanan sidang di luar Gedung Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024.

Table 18. Sidang Keliling Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

No.	Satuan Kerja	Jumlah Zitting Plaatz	Lokasi Sidang Zitting Plaatz	Jumlah Perkara Diselesaikan Di Zitting Plaatz Th. 2024
1	PN Bale Bandung	0	Mall Pelayanan Publik Soreang	166
2	PN Bandung	0	0	0
3	PN Banjar	0	0	0
4	PN Bekasi	0	0	0
5	PN Bogor	0	Mall Pelayanan Publik Kota Bogor	9
6	PN Ciamis	1	Gedung Zitting Platts Jl. Pengadilan Lama No. 2 Pangandaran	12
7	PN Cianjur	0	0	0
8	PN Cibadak	150	Jl. Siliwangi No.80, Cibadak, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	51
9	PN Cibinong	111	Gedung Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	4
10	PN Cikarang	0	Sidang Keliling	56
11	PN Cirebon	13	Gedung Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Jl. Pangeran Drajat No. 49 Kecamatan Kesambi, Cirebon	13

12	PN Depok	0	Tidak ada lokasi zitting platz	0
13	PN Garut	19	I. Pembangunan No.2, Simpang Lima, Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151	19
14	PN Indramayu	0	0	0
15	PN Karawang	0	0	0
16	PN Kuningan	0	Kantor Desa, Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sesuai domisili	50
17	PN Majalengka	0	0	0
18	PN Purwakarta	1	Mall Pelayanan Publik Madukara	293
19	PN Subang	0	Sidang Keliling	76
20	PN Sukabumi	0	Tidak ada lokasi Zitting Plaatz	0
21	PN Sumber	0	0	0
22	PN Sumedang	0	0	0
23	PN Tasikmalaya	0	0	0
Jumlah		295		749

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Berikut data Prodeo pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024.

Table 19. Ralisasi Anggaran dan Layanan Prodeo Pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Barat

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2024	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	Realisasi Anggaran Prodeo	
				(Rp.)	(%)
1	PN Bale Bandung	5	Rp 640,000	Rp 425,000	66.41%
2	PN Bandung	4	Rp 2,010,000	Rp 328,160	16.33%
3	PN Banjar	2	Rp 640,000	Rp 220,000	34.38%
4	PN Bekasi	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	PN Bogor	3	Rp 1,340,000	Rp 540,000	40.30%
6	PN Ciamis	5	Rp 420,000	Rp 420,000	100.00%
7	PN Cianjur	8	Rp 855,000	Rp 760,000	88.89%
8	PN Cibadak	2	Rp 1,340,000	Rp 120,000	8.96%
9	PN Cibinong	5	Rp 5,340,000	Rp 4,774,000	89.40%
10	PN Cikarang	4	Rp 3,350,000	Rp 1,282,000	38.27%
11	PN Cirebon	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	PN Depok	2	Rp 1,340,000	Rp 365,000	27.24%
13	PN Garut	16	Rp 3,350,000	Rp 1,685,000	50.30%
14	PN Indramayu	10	Rp 1,100,000	Rp 1,100,000	100.00%

15	PN Karawang	20	Rp 2,010,000	Rp 1,998,000	99.40%
16	PN Kuningan	20	Rp 13,400,000	Rp 2,296,000	17.13%
17	PN Majalengka	5	Rp 1,280,000	Rp 300,000	23.44%
18	PN Purwakarta	6	Rp 670,000	Rp 670,000	100.00%
19	PN Subang	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
20	PN Sukabumi	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
21	PN Sumber	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
22	PN Sumedang	3	Rp 2,560,000	Rp 255,000	9.96%
23	PN Tasikmalaya	9	Rp 1,340,000	Rp 640,000	47.76%
Jumlah		129	Rp 42,985,000	Rp 18,178,160	42.29%



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Mutasi.

B. Promosi.

C. Pensiun

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis).

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SDM

Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjalankan tugas dalam hal pelayanan publik dibidang penegakkan Hukum terdiri dari bidang Teknis dan Non Teknis adapun sumber daya manusia sebagai berikut ;

Table 20. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bandung

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.	Ketua	Jumlah Hakim Tinggi 38 Orang
2	Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	
3	BACHTIAR SITOMPUL, S.H. M.H.	Hakim Tinggi	
4	POLTAK SITORUS, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
5	HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.	Hakim Tinggi	
6	ZAHERWAN LESMANA, S.H.	Hakim Tinggi	
7	MOCH MAWARDI, S.H. M.H.	Hakim Tinggi	
8	R MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
9	HIRAS SIHOMBING, S.H.	Hakim Tinggi	
10	ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
11	PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	
12	RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
13	JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	
14	Hj. JUNILAWATI HARAHAP, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
15	Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
16	IMAN GULTOM, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
17	MARISI SIREGAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
18	PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
19	SUDARWIN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	

20	TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Jumlah Hakim Tinggi 38 Orang
21	SUKMAYANTI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
22	MULYANTO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
23	Dr. KRISTWAN GENOVA DAMANIK, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	
24	H BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H, M.H.	Hakim Tinggi	
25	Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
26	MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
27	IDA MARION, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
28	MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
29	ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
30	VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H.MSi.	Hakim Tinggi	
31	Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
32	BARITA SARAGIH, S.H.L.L.M.	Hakim Tinggi	
33	MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	
34	CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
35	Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
36	EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
37	Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
38	KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
39	SURANTO, S.H.	Hakim Tinggi Yustisial	Jumlah Hakim Tinggi Yustisial 1 Orang
40	Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tk. Banding	Jumlah Hakim Adhoc Tk.Banding 5 Orang
41	Hj. LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tk. Banding	
42	EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.	Hakim Adhoc Tk. Banding	
43	Dr. LUFSIANA, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tk. Banding	
44	HULMAN SIREGAR, Ak, S.H., CFrA, CA.	Hakim Adhoc Tk. Banding	
45	HANDOKO KRISTIYOSO, S.H. MBL., M.Hum.	Hakim Yustisial	Jumlah Hakim Yustisial 4 Orang
46	PRANOTO, S.H.	Hakim Yustisial	

47	Dr. GUNAWAN, S.H., M.H.	Hakim Yustisial	
48	UCU JAYA SARJANA SIMATUPANG, S.H.	Hakim Yustisial	
49	RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.	Hakim Yustisial (Non Palu)	Jumlah Hakim Yustisial (Non Palu) 2 Orang
50	TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.	Hakim Yustisial (Non Palu)	
51	Drs. DJAMALUDDIN DAENG NGEMBA, S.H, M.Hum.	Panitera	Jumlah Pejabat Struktural 9 Orang
52	DANI ADHIA WARDANA, S.T.	Kabag Umum dan Keuangan	
53	UMMI HANI, S.Sos.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	
54	RIDWAN NURDIN, S.H.	Panmud Hukum	
55	Hj. NENENG WARLINAH, S.H., M.H.	Panmud Tipikor	
56	SUSILO NANDANG BAGIO, S.H., M.H.	Panmud Perdata	
57	SRI SURATNO WIBOWO, S.T.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	
58	ELNA HELNIARIKA, S.Kom., M.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
59	SIDIK NUGRAHA, S.Kom.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	
60	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Jumlah Panitera Pengganti 26 Orang
61	ROSMALINDA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
62	Hj. TRI MULYANI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
63	ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
64	BAMBANG SUGIANTO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
65	ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
66	ENDANG SUMARNO, S.H.	Panitera Pengganti	
67	GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
68	SRI YUDITIANI, S.H.	Panitera Pengganti	
69	JAFRI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
70	HERMANSYAH.,S.H	Panitera Pengganti	
71	KRISNA SOFIADI, S.H.	Panitera Pengganti	
72	NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	

73	YETI NINGSIH, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Jumlah Panitera Pengganti 26 Orang
74	HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
75	ERNIWATI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
76	JONO YULIANTO, S.H.	Panitera Pengganti	
77	ARLISA YUNITA NELYANA, S.H.	Panitera Pengganti	
78	BAMBANG BELARDAYA, S.H.	Panitera Pengganti	
79	YANA HEDIYANA, S.H.	Panitera Pengganti	
80	SAIFUL ASNURI, S.H.	Panitera Pengganti	
81	NURDIANA, S.H.	Panitera Pengganti	
82	H. KAIRUL FASJA, S.H.	Panitera Pengganti	
83	YANI SOFYAN, S.H.	Panitera Pengganti	
84	SRI SUBEKTI TRIANA, S.H.	Panitera Pengganti	
85	HENDAYANI, S.H.	Panitera Pengganti	
86	ARY FARIDAH, S.Si., M.M.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Jumlah Fungsional Tertentu 8 Orang
87	ALJUNALLIADI, S.E., S.H.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	
88	NURHAFINA NOVIANA, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	
89	TIA ADISTIAN PASHA, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
90	ANDRIE MAERI RUSBAYANA, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir	
91	NURUL YULIA DWI ASTUTI, S.I.Kom.	Pustakawan Ahli Pertama	
92	DEVIRA WIENA PRAMINTYA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
93	HANI NUR AINI, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	
94	ANTON SENJAYA, S.Kom., SH.	Klerik-Analisis Perkara Peradilan	Jumlah Pelaksana 21 Orang
95	FITRI KRISTIANTI, S.E., Ak.	Operator-Penata Layanan Operasional	
96	APRIYANI ADI UTAMI, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	
97	HERA CAPRINA PERMATASARI, S.I.Kom., S.H.	Klerik-Analisis Perkara Peradilan	
98	YOGI ISKANDAR PAMUNGKAS PUTRA, S.H.	Klerik-Analisis Perkara Peradilan	
99	LIES HENDRAWANI	Klerik-Pengadministrasi Perkantoran	

100	LISNA INDRAWATI	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran	Jumlah Pelaksana 21 Orang
101	NISA WANGSITA, S.Psi.	Operator-Penata Layanan Operasional	
102	YUNI CLARA, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	
103	MARTINA MAGDALENA BARASA, S.T.	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	
104	ZENI PUTERI SIMANGUNSONG, S.Ak.	Operator-Penata Layanan Operasional	
105	AYU PERMATA SARI.,A.Md	Klerek-Pengolah Data dan Informasi	
106	INDRA RIZKY FIRMANSYAH, A.Md.T.	Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana	
107	RESTI APRILIA, A.Md.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	
108	FERGIE NOVITA WASSAHDAD, A.Md.Ak.	Klerek-Pengolah Data dan Informasi	
109	SAEPULOH	Klerek-Pengadministrasi Perkantoran	
110	SRI ANGELA SIALLAGAN, A.Md.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	
111	PUPUT WULANSARI, A.md	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	
112	LUKMAN ILMAN NURHAKIM, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	
113	OLIVIA WAHYU KUSUMANINGTYAS, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	
114	ANNISA AYU LESTARI, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Jumlah PPPK 4 Orang
115	BUDYAWAN HERIJANTO, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	
116	HERU BUDIYANTO, S.IP.	Perencana Ahli Pertama	
117	FITRIA NUR FAUZIAH, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
118	RIA IRAWATI PUSPITASARI, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	

Table 21. Sumber Daya Manusia Pegawai Kontrak (PPNPN)

NO	NAMA	PENDIDIKAN
1	CECEP SURAHMAN	SMA
2	TENDI KOSTAMAN	SMA
3	DEDI LUSIYANA	SMU
4	DEDI IRAWAN	SMU

5	DADANG ANWAR	SMK
6	EDDY EFFENDI	SMT Pertanian Negeri
7	NANTA SUWARNA	STM
8	HERI SUPRIYADI	MA
9	SAEFUL FAUZI SOBARI, S.H.	S1
10	AHMAD SOLIHIN, S.H.	S1
11	HEDI	SMU
12	WINA YUSTIDAMAYANTI, S.I.Kom.	S1
13	WIDA AMELIA, S.IP.	S1
14	FATHIA FARAHNASH, S.E.	S1
15	IWAN SETIAWAN	SMK
16	RIDZKI ANDIYONO PUTRO, S.Ak.	S1
17	AGHNIA RUSYDA, S.E.	S1
18	M. SAEFUL	SD
19	YOGI PERMADI, S.H.	S1

Table 22. Data Pegawai Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

NO	SATKER	KETUA	WAKIL	HAKIM TINGGI	HAKIM	HAKIM ADHOC	HAKIM YUST	PANITERA	SEKRETARIS	PANMUD	KABAG	KASUB	PP	JS	JSP	PELAKSANA	JFT	PPPK	PPNPN	JUMLAH PEGAWAI
1	PT BANDUNG	1	1	36	-	5	7	1	-	3	2	3	26	-	-	21	8	4	19	137
2	PN BANDUNG KELAS 1A KHUSUS	1	1	-	40	16	-	1	1	5	1	3	32	9	14	16	2	-	24	166
3	PN BEKASI KELAS 1A KHUSUS	1	1	-	28	-	-	1	1	3	1	3	20	7	7	25	3	1	12	114
4	PN BALE BANDUNG KELAS 1A	1	1	-	19	-	-	1	1	2	-	3	22	3	5	18	1	1	11	89
5	PN CIBINONG KELAS 1A	1	1	-	15	-	-	1	1	3	-	3	15	5	3	24	2	-	17	91
6	PN TASIKMALAYA KELAS 1A	1	1	-	8	-	-	1	1	3	-	3	9	1	2	21	1	-	10	62
7	PN BOGOR KELAS 1A	1	1	-	18	-	-	1	1	2	-	3	11	4	7	20	-	-	10	79
8	PN DEPOK KELAS 1A	1	1	-	18	-	-	1	1	3	-	3	20	2	7	21	4	-	14	96
9	PN SUMBER KELAS 1A	1	1	-	8	-	-	1	1	3	-	3	9	1	3	16	-	-	12	59
10	PN CIREBON KELAS 1B	1	1	-	4	-	-	1	1	3	-	3	6	3	1	19	-	-	10	53
11	PN CIANJUR KELAS 1B	1	1	-	6	-	-	1	1	3	-	3	7	2	3	19	-	-	12	59
12	PN SUKABUMI KELAS 1B	1	1	-	4	-	-	1	1	3	0	3	2	2	2	16	-	-	9	45
13	PN CIBADAK KELAS 1B	1	1	-	4	-	-	1	1	3	-	1	2	2	2	8	-	-	14	40
14	PN GARUT KELAS 1B	1	1	-	5	-	-	1	1	3	-	3	6	2	2	19	-	-	9	53
15	PN CIAMIS KELAS 1B	1	1	-	4	-	-	1	1	3	-	3	5	-	1	19	-	-	10	49
16	PN INDRAMAYU KELAS 1B	1	1	-	6	-	-	1	1	3	-	3	7	3	3	18	-	-	9	56
17	PN PURWAKARTA KELAS 1B	1	1	-	12	-	-	1	1	3	-	2	4	4	2	10	-	-	7	48
18	PN SUBANG KELAS 1B	1	1	-	8	-	-	1	1	3	-	2	7	3	3	18	-	-	12	60

19	PN SUMEDANG KELAS 1B	1	1	-	5	-	-	1	1	3	-	2	4	2	-	19	1	-	9	49
20	PN KARAWANG KELAS 1B	1	1	-	15	-	-	1	1	3	-	3	16	3	4	23	1	-	8	80
21	PN KUNINGAN KELAS II	1	1	-	4	-	-	1	1	3	-	3	5	2	4	4	1	-	8	38
22	PN MAJALENGKA KELAS II	1	-	-	4	-	-	1	1	3	-	3	4	3	2	6	-	-	10	38
23	PN CIKARANG KELAS II	1	1	-	9	-	-	1	1	3	-	2	12	2	1	6	1	1	8	49
24	PN BANJAR KELAS II	1	1	-	3	-	-	1	1	3	-	3	2	2	-	5	-	-	8	30
J U M L A H		24	23	36	247	21	7	24	23	72	4	66	253	67	78	391	25	7	272	1.640

Table 23. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan (PNS) Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

NO	SATKER	Pembina Utama	Pembina Utama Madya	Pembina Utama Muda	Pembina Tk. I	Pembina	Penata Tk. I	Penata	Penata Muda Tk. I	Penata Muda	Pengatur Tk. I	Pengatur	Pengatur Muda Tk. I	Pengatur Muda	Juru Tk. I	Juru	Juru Muda Tk. I	Juru Muda
1	PT BANDUNG	39	4	1	3	19	20	2	8	6	4	3	-	-	-	-	-	-
2	PN BANDUNG KELAS 1A KHUSUS	-	28	9	5	14	36	7	3	8	1	8	4	-	-	-	-	-
3	PN BEKASI KELAS 1A KHUSUS	-	15	11	7	8	22	5	6	23	1	4	-	-	-	-	-	-
4	PN BALE BANDUNG KELAS 1A	-	3	4	14	6	21	4	4	14	1	4	-	-	-	1	-	-
5	PN CIBINONG KELAS 1A	-	1	3	13	6	14	7	7	19	2	2	-	-	-	-	-	-
6	PN TASIKMALAYA KELAS 1A	-	1	1	8	2	13	2	6	15	1	3	-	-	-	-	-	-
7	PN BOGOR KELAS 1A	-	-	2	9	11	15	7	5	14	2	2	2	-	-	-	-	-
8	PN DEPOK KELAS 1A	-	1	-	4	18	22	7	10	19	1	-	-	-	-	-	-	-
9	PN SUMBER KELAS 1A	-	-	3	2	10	11	4	2	15	1	2	-	-	-	-	-	-

NO	SATKER	Pembina Utama	Pembina Utama Madya	Pembina Utama Muda	Pembina Tk. I	Pembina	Penata Tk. I	Penata	Penata Muda Tk. I	Penata Muda	Pengatur Tk. I	Pengatur	Pengatur Muda Tk. I	Pengatur Muda	Juru Tk. I	Juru	Juru Muda Tk. I	Juru Muda
10	PN CIREBON KELAS 1B	-	-	-	3	6	10	3	4	15	1	1	-	1	-	-	-	-
11	PN CIANJUR KELAS 1B	-	-	-	2	10	11	3	4	14	1	2	-	-	-	-	-	-
12	PN SUKABUMI KELAS 1B	-	-	-	3	5	7	-	5	14	-	2	-	-	-	-	-	-
13	PN CIBADAK KELAS 1B	-	-	-	2	4	7	1	3	4	1	3	1	-	-	-	-	-
14	PN GARUT KELAS 1B	-	-	-	2	6	11	4	5	13	1	1	1	-	-	-	-	-
15	PN CIAMIS KELAS 1B	-	-	-	2	5	9	4	3	14	-	2	-	-	-	-	-	-
16	PN INDRAMAYU KELAS 1B	-	-	-	2	5	11	6	8	13	0	2	-	-	-	-	-	-
17	PN PURWAKARTA KELAS 1B	-	-	-	4	6	115	2	7	3	2	2	-	-	-	-	-	-
18	PN SUBANG KELAS 1B	-	-	1	1	4	10	5	7	13	2	5	-	-	-	-	-	-
19	PN SUMEDANG KELAS 1B	-	-	-	2	4	11	2	3	17	0	1	-	-	-	-	-	-
20	PN KARAWANG KELAS 1B	-	-	-	2	10	22	11	6	15	2	3	1	-	-	-	-	-
21	PN KUNINGAN KELAS II	-	-	-	2	2	9	2	6	6	1	1	1	-	-	-	-	-
22	PN MAJALENGKA KELAS II	-	-	-	1	2	5	5	9	2	1	2	1	-	-	-	-	-
23	PN CIKARANG KELAS II	-	-	-	-	4	16	4	11	3	1	1	-	-	-	-	-	-
24	PN BANJAR KELAS II	-	-	-	-	2	8	1	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		39	53	35	93	169	436	98	139	280	29	57	11	1	0	1	0	0

Table 24. Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional (PPPK) Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

NO	SATKER	Ahli Utama (Gol. XVI)	Ahli Madya (Gol. XIII)	Ahli Muda (Gol. XI)	Ahli Pertama (Gol. X)	Ahli Pertama (Gol. IX)	Penyelia (Gol. XI)	Mahir (Gol. IX)	Terampil (Gol. VI dan VII)	Pemula (Gol. V)
1	PT BANDUNG	-	-	-	-	-	-	3	1	-
2	PN BANDUNG KELAS 1A KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PN BEKASI KELAS 1A KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	PN BALE BANDUNG KELAS 1A	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	PN CIBINONG KELAS 1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PN TASIKMALAYA KELAS 1A	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	PN BOGOR KELAS 1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PN DEPOK KELAS 1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PN SUMBER KELAS 1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PN CIREBON KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PN CIANJUR KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PN SUKABUMI KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PN CIBADAK KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PN GARUT KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PN CIAMIS KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PN INDRAMAYU KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PN PURWAKARTA KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PN SUBANG KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PN SUMEDANG KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PN KARAWANG KELAS 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21	PN KUNINGAN KELAS II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PN MAJALENGKA KELAS II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PN CIKARANG KELAS II	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	PN BANJAR KELAS II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		-	-	-	-	-	-	4	3	-

Table 25. SDM Berdasarkan Kelompok Golongan

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN IV (ORANG)	GOLONGAN III (ORANG)	GOLONGAN II (ORANG)	GOLONGAN I (ORANG)
1	PT BANDUNG	66	36	7	-
2	PN BANDUNG KELAS 1A KHUSUS	47	61	18	-
3	PN BEKASI KELAS 1A KHUSUS	41	55	5	-
4	PN BALE BANDUNG KELAS 1A	27	43	6	1
5	PN CIBINONG KELAS 1A	33	47	4	-
6	PN TASIKMALAYA KELAS 1A	12	36	4	-
7	PN BOGOR KELAS 1A	22	41	6	-
8	PN DEPOK KELAS 1A	23	58	1	-
9	PN SUMBER KELAS 1A	12	32	2	-
10	PN CIREBON KELAS 1B	9	30	3	-
11	PN CIANJUR KELAS 1B	12	32	3	-
12	PN SUKABUMI KELAS 1B	8	26	2	-
13	PN CIBADAK KELAS 1B	6	15	5	-
14	PN GARUT KELAS 1B	8	33	3	-
15	PN CIAMIS KELAS 1B	7	30	2	-
16	PN INDRAMAYU KELAS 1B	7	38	2	-
17	PN PURWAKARTA KELAS 1B	10	27	4	-
18	PN SUBANG KELAS 1B	6	35	7	-
19	PN SUMEDANG KELAS 1B	6	33	1	-
20	PN KARAWANG KELAS 1B	12	54	6	0
21	PN KUNINGAN KELAS II	4	23	3	-
22	PN MAJALENGKA KELAS II	3	21	4	-
23	PN CIKARANG KELAS II	4	34	2	-
24	PN BANJAR KELAS II	2	17	3	-
J U M L A H		387	857	103	1

Table 26. SDM Berdasarkan Kelompok Pendidikan

NO	SATUAN KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA
1	PT BANDUNG	7	56	43	9	-	-	3
2	PN BANDUNG KELAS 1A KHUSUS	3	56	55	3	-	-	9
3	PN BEKASI KELAS 1A KHUSUS	2	33	44	6	-	-	4
4	PN BALE BANDUNG KELAS 1A	2	21	42	6	-	-	6
5	PN CIBINONG KELAS 1A	-	23	43	5	-	-	3
6	PN TASIKMALAYA KELAS 1A	1	8	36	4	-	-	3
7	PN BOGOR KELAS 1A	2	27	30	4	-	-	6
8	PN DEPOK KELAS 1A	1	30	49	2	-	-	-
9	PN SUMBER KELAS 1A	1	12	33	2	-	-	2
10	PN CIREBON KELAS 1B	1	12	24	2	-	-	5
11	PN CIANJUR KELAS 1B	-	13	30	2	-	-	2
12	PN SUKABUMI KELAS 1B	-	9	21	3	-	-	3
13	PN CIBADAK KELAS 1B	-	8	11	3	-	-	-
14	PN GARUT KELAS 1B	-	8	28	4	-	-	4
15	PN CIAMIS KELAS 1B	-	9	26	2	-	-	2
16	PN INDRAMAYU KELAS 1B	1	6	25	2	-	-	13
17	PN PURWAKARTA KELAS 1B	1	14	15	5	-	-	6
18	PN SUBANG KELAS 1B	1	12	24	3	-	-	8
19	PN SUMEDANG KELAS 1B	-	11	25	1	-	-	3
20	PN KARAWANG KELAS 1B	1	22	38	4	-	-	7
21	PN KUNINGAN KELAS II	-	9	18	2	-	-	1
22	PN MAJALENGKA KELAS II	-	6	12	2	-	-	8
23	PN CIKARANG KELAS II	-	13	25	3	-	-	-
24	PN BANJAR KELAS II	1	2	13	4	-	-	1
J U M L A H		25	420	710	83	0	0	99

Table 27. Kenaikan Pangkat, Promosi, Mutasi Dan Pensiun

NO	SATKER	KENAIKAN PANGKAT	PROMOSI	MUTASI	PENSIUN	TOTAL
1	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	6	6	48	21	81
2	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	17	5	15	3	40
3	PENGADILAN NEGERI BEKASI	11	-	10	1	22
4	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	14	4	4	2	20
5	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	9	10	5	1	25
6	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	1	11	3	-	15
7	PENGADILAN NEGERI BOGOR	9	7	20	1	37
8	PENGADILAN NEGERI DEPOK	14	11	34	1	59
9	PENGADILAN NEGERI SUMBER	6	5	5	2	18
10	PENGADILAN NEGERI CIREBON	3	1	3	5	12
11	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	7	4	5	-	16
12	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	2	7	20	-	29
13	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	2	6	1	1	10
14	PENGADILAN NEGERI GARUT	7	7	2	3	19
15	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	3	15	5	2	24
16	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	2	3	2	4	11
17	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	6	10	9	2	27
18	PENGADILAN NEGERI SUBANG	7	7	12	1	27
19	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	6	12	14	1	33
20	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	7	23	4	2	36
21	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	5	1	9	1	16
22	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	7	2	16	1	26
23	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	6	10	1	1	18
24	PENGADILAN NEGERI BANJAR	10	0	7	0	17
TOTAL		167	167	254	56	

1. MUTASI PEGAWAI

Mutasi yang terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung selama Januari sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Table 28. Matrik Mutasi Masuk Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024

NO	NAMA	MUTASI MASUK
1	YETI NINGSIH, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Banten Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 2 Januari 2024
2	RIDWAN NURDIN, S.H.	Mutasi dari Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 3 Januari 2024
3	SUSILO NANDANG BAGIO, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Pengadilan Negeri Cikarang Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 3 Januari 2024
4	ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Pengadilan Negeri Banjar Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 3 Januari 2024
5	NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Purwakarta Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 3 Januari 2024
6	TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Menjadi Hakim Yustisial (Non Palu) Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 12 Februari 2024
7	Hj. JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 6 Maret 2024
8	CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 6 Maret 2024

NO	NAMA	MUTASI MASUK
9	SUKMAYANTI, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 8 Maret 2024
10	MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 13 Maret 2024
11	H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 14 Maret 2024
12	RIO LERY PUTRA MAMONTO. S.H.	Mutasi dari Hakim Pengadilan Negeri Subang Menjadi Hakim Yustisial (Non Palu) Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 25 Maret 2024
13	HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 7 Mei 2024
14	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Pengadilan Negeri Serang Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 31 Mei 2024
15	GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Karawang Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 31 Mei 2024
16	JAFRI, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Pengadilan Negeri Majalengka Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 31 Mei 2024
17	ERNIWATI, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Muda Khusus Perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Menjadi Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 31 Mei 2024
18	Dr. MOH. EKA KARTIKA E.M., S.H., M.Hum.	Mutasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 2 Juli 2024

NO	NAMA	MUTASI MASUK
19	Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 22 Juli 2024
20	HIRAS SIHOMBING, S.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 22 Juli 2024
21	Ny. IDA MARION, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 22 Juli 2024
22	BARITA SARAGIH, S.H., LL.M.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 22 Juli 2024
23	HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 5 Agustus 2024
24	MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 5 Agustus 2024
25	VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 9 Agustus 2024
26	Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 19 Agustus 2024
27	PUPUT WULANSARI, A.Md.	Mutasi dari Klerek-Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Balikpapan Menjadi Klerek-Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 20 Agustus 2024

NO	NAMA	MUTASI MASUK
28	ARY FARIDAH, S.Si., M.M.	Mutasi dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Analis Pengelolaan APBN Ahli Muda Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 20 September 2024
29	Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.	Mutasi dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 25 Oktober 2024
30	Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 12 November 2024
31	Hj. NENENG WARLINAH, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya Menjadi Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 14 November 2024
32	SUSILO NANDANG BAGIO, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 14 November 2024
33	ARLISA YUNITA NELYANA, S.H.	Mutasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 14 November 2024
34	MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 18 November 2024
35	ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 18 November 2024

Table 29. Matrik Mutasi Keluar Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024.

NO	NAMA	MUTASI KELUAR
1	SAKIR BACO, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta TMT 3 Januari 2024
2	SITI YURISTIYA AKUAN, S.H.,M.H.	Mutasi dari Hakim Yustisial (Non Palu) Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Hakim Pangadilan Negeri Sukabumi TMT 27 Februari 2024
3	BURHANNURDIN ACHMAD BANGSADIRIA, S.H	Mutasi dari Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Calon Hakim Pengadilan Negeri Cirebon TMT 5 Februari 2024
4	YULI HERYATI, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten TMT. 1 April 2024
5	R. BELINDA NURHAYATI, S.H.	Mutasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta TMT. 13 Mei 2024
6	ROSLINA NAPITUPULU, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta TMT. 14 Mei 2024
7	DEHEL K. SANDAN, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang TMT. 1 Agustus 2024
8	AGUS PURWANTO, A.Md.	Mutasi dari Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Klerek-Pengolah Data dan Informasi Pengadilan Negeri Cibinong TMT. 3 September 2024
9	Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.	Mutasi dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

		TMT. 2 Oktober 2024
10	SUSANTO, S.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang TMT. 5 November 2024
11	SRI ANDINI, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta TMT. 8 November 2024
12	Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H., M.H.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta TMT. 8 November 2024
13	Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.	Mutasi dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta TMT. 8 November 2024

2. PROMOSI PEGAWAI

Promosi yang terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung selama Januari sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Table 30. Matrik Promosi Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024

NO	NAMA	PROMOSI
1	RIDWAN NURDIN, S.H.	Mutasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 7 Mei 2024
2	SUSILO NANDANG BAGIO, S.H., M.H.	Mutasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung TMT. 7 Mei 2024
3	EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.	Mutasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung

		Menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung TMT. 17 Mei 2024
4	INU NURHIDAYAT, S.Pd., S.H.	Mutasi dari Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta TMT. 21 November 2024
5	ROMLI, S.H.	Mutasi dari Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut TMT. 22 November 2024
6	GALIH SAMSURIZAL, S.Kom.	Mutasi dari Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Bandung Menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan TMT. 20 Desember 2024

3. Pensiun

Pensiun yang terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung selama Januari sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Table 31. Matrik Pensiun Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	TMT PENSIUN	JABATAN
1	Hj. NURMADIAH NURDIN, S.H., M.H	196202201983032005	20 02 1962	01 03 2024	Panitera Muda Hukum
2	HIDAYATUL MANAN, S.H.,M.H.	195703211985031005	21 03 1957	01 04 2024	Hakim Tinggi
3	ARNELIA, S.H., M.H.	195703291985122001	29 03 1957	01 04 2024	Hakim Tinggi
4	ACEP IMAN, S.H.,M.H.	196203051985021001	05 03 1962	01 04 2024	Panitera Pengganti
5	RIAN ABURISMAN, S.H.	196203031983121001	03 03 1962	01 04 2024	Panitera Pengganti
6	WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H., M.H	195704191987021001	19 04 1957	01 05 2024	Hakim Tinggi
7	Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.	195705031984031002	03 05 1957	01 06 2024	Ketua Pengadilan Tinggi
8	JUJU SUTRISNA	196606121993031005	12 06 1966	01 07 2024	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran
9	Hj. YEFNI DELFITRI, S.H., M.H.	196407031991032005	03 07 1964	01 08 2024	Sekretaris
10	SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H., M.H.	196207161983032002	06 07 1962	01 08 2024	Panitera Pengganti
11	AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.	195708221985121001	22 08 1957	01 09 2024	Hakim Tinggi
12	DEDE PARJAMAN, S.H.	196209301990031003	30 09 1962	01 10 2024	Panitera Pengganti
13	ASEP GUNAWAN, S.H.	197202071994031003	07 02 1972	30 10 2024	Panitera Pengganti (Meninggal Dunia)
14	SYAFARUDDIN, S.H.	195710191984031002	19 10 1957	01 11 2024	Hakim Tinggi
15	VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum.	195710091986021001	09 10 1957	01 11 2024	Hakim Tinggi
16	H. NANANG PRIATNA, S.H.	196210101992031007	10 10 1962	01 11 2024	Panitera Muda Perdata
17	TITI MARIA ROMLAH, S.H.	196202071988032002	07 02 1962	12 11 2024	Hakim Yustisial (Meninggal Dunia)
18	MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.	195711291985031001	29 11 1957	01 12 2024	Hakim Tinggi
19	BARMEN SINURAT, S.H.	195711061986121001	06 11 1957	01 12 2024	Hakim Tinggi
20	MARDONO, S.H., M.H.	196211091983031008	09 11 1962	01 12 2024	Panitera Muda Pidana
21	NINIK KUNCAYANI, S.H.	197902132000122002	13 02 1979	01 12 2024	Klerek - Penata Keprotokolan

4. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis Yang telah mengikuti Diklat)

Untuk peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Bandung Bidang Teknis/Non Teknis, SDM yang mengikuti Diklat selama Januari sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Table 32. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)

NO	UNIT KERJA	DIKLAT	
		TEKNIS	NON TEKNIS
1	PT BANDUNG	16	8
2	PN BANDUNG	8	6
3	PN BEKASI	28	-
4	PN BALE BANDUNG	8	3
5	PN CIBINONG	7	16
6	PN TASIKMALAYA	8	7
7	PN BOGOR	-	6
8	PN DEPOK	5	29
9	PN SUMBER	8	-
10	PN CIREBON	12	-
11	PN CIANJUR	11	6
12	PN SUKABUMI	37	7
13	PN CIBADAK	12	-
14	PN GARUT	11	4
15	PN CIAMIS	18	3
16	PN INDRAMAYU	6	17
17	PN PURWAKARTA	14	1
18	PN SUBANG	28	7
19	PN SUMEDANG	10	14
20	PN KARAWANG	20	11
21	PN KUNINGAN	12	4
22	PN MAJALENGKA	1	10
23	PN CIKARANG	20	1
TOTAL		300	160



BAB IV

PROGRAM PRIORITAS

- A. Pengelolaan Keuangan.**
- B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.**
- C. Pengelolaan Teknologi Informasi.**

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 248 bahwa Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Peraturan di bidang keuangan, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun secara garis besar kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan di Pengadilan Tinggi Bandung meliputi kegiatan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pada Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Tinggi Bandung telah menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yakni :

Table 33. Realisasi Anggaran Dipa 01 (BUA) dan Dipa 03 (BADILUM)

No.	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Jumlah DIPA
1.	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA-005.01.2.097500/2024	24 November 2023	42.718.258.000
2.	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.03.2.099067/2024	24 November 2023	485.860.000

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 9 kali Revisi DIPA BUA dan 6 kali Revisi DIPA BADILUM sebagai berikut :

Table 34. Pagu Awal dan Pagu Akhir DIPA 01 (BUA)

No.	DIPA BUA (01)		
	24 November 2023	42.718.258.000	DIPA Awal
	Desember 2024	44.743.258.000	DIPA Akhir

Table 35. Pagu Awal dan Pagu Akhir DIPA 03 (Badilum)

No.	DIPA BADILUM (03)		
	24 November 2023	485.860.000	DIPA Awal
	Desember 2024	555.860.000	DIPA Akhir

1) DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA)

DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Berikut ini pengertian dari 3 (tiga) jenis belanja tersebut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, yakni:

a. Belanja Pegawai

Merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan pensiunan serta Pegawai Honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Antara lain meliputi gaji dan tunjangan, uang makan, uang kehormatan Hakim Adhoc Tipikor.

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan / atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan.

Antara lain meliputi belanja barang operasional dan belanja barang non operasional.

c. **Belanja Modal**

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan / atau menambah nilai asset tetap / asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap / asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Antara lain meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal lainnya.

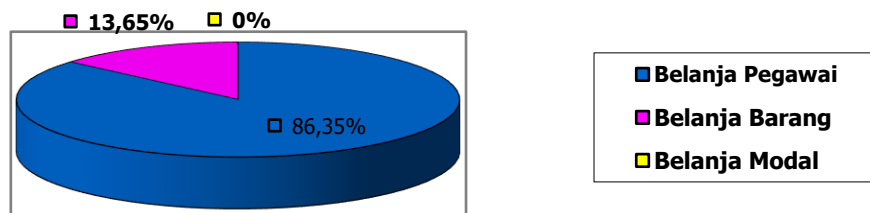
1.1 DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung

DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung (Revisi ke-7) Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 44.743.258.000,-** (*Empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) sebelumnya Pagu DIPA sebesar **Rp. 43.358.258.000,-** (*Empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*). Adapun dengan perincian pagu belanja sebagai berikut :

Table 36. Detil Realisasi DIPA 01 (BUA)

1. Belanja Pegawai	: Rp.	38.633.844.000,-	(86.35 %)
2. Belanja Barang	: Rp.	6.109.414.000,-	(13.65 %)
3. Belanja Modal	: Rp.	-	(0 %)

Gambar 3. Grafik Pagu Dipa 01 (BUA) Berdasarkan Jenis Belanja



2) DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM)

2.1 DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung

DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja barang sebesar **Rp. 555.860.000,- (Lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**. DIPA Badilum 03 dengan 8 kali revisi. DIPA sebelumnya sebesar **Rp. 485.860.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**.

2.2 Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebesar **Rp. 554.776.351,-(Lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah)**. atau **99,81%**.

3) Jumlah SPM (Surat Perintah Membayar)

Jumlah SPM yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2024 adalah **353 SPM** terdiri dari **316 SPM DIPA 01(097500)** dan **37 SPM DIPA 03 (099067)**.

Pengelolaan Perbendaharaan

- a) LPJ Bendahara DIPA BUA tiap bulan.
- b) LPJ Bendahara DIPA BADILUM tiap bulan.
- c) GUP DIPA BUA (01) sebanyak 22 kali.
- d) GTUP DIPA BUA (01) sebanyak 1 kali.
- e) GUP DIPA BADILUM (03) sebanyak 22 kali.
- f) GTUP DIPA BADILUM (03) sebanyak 2 kali.

Table 37. Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung.

NO	BULAN	LRA 01	LRA 03
1	JANUARI	9,11 %	2,35 %
2	FEBRUARI	15,85 %	9,22 %
3	MARET	29,90 %	10,57 %
4	APRIL	36,78 %	12,17 %
5	MEI	43,06 %	20,73 %
6	JUNI	55,82 %	29,98 %

7	JULI	63,93 %	57,96 %
8	AGUSTUS	70,50 %	69,54 %
9	SEPTEMBER	77,83 %	73,05 %
10	OKTOBER	84,61 %	70,65 %
11	NOVEMBER	93,27 %	72,48 %
12	DESEMBER	99,38 %	99,81 %

Table 38. LRA DIPA 01 TA 2024 Se Wilayah Jawa Barat

No	kode Satker	Nama Satker	Nilai Pagu	Nilai Realisasi	Sisa Pagu
1	097500	Pengadilan Tinggi Bandung	44.743.258.000	44,468,043,715 (99.38 %)	275.214.285
2	097514	PN Bandung	32.060.449.000	31,892,740,104 (99.48 %)	167.708.896
3	097521	PN Sumedang	5.649.766.000	5,538,165,092 (98.02 %)	111.600.908
4	097535	PN Tasikmalaya	9.648.251.000	9,517,691,002 (98.65 %)	130.559.998
5	097542	PN Garut	6.015.033.000	5,609,051,011 (93.25 %)	405.981.989
6	097556	PN Ciamis	5.695.017.000	5,682,156,761 (99.77 %)	12.860.239
7	097603	PN Purwakarta	7.805.036.000	7,671,790,385 (98.29 %)	133.245.615
8	097610	PN Bekasi	23.366.021.000	23,196,039,907 (99.27 %)	169.981.093
9	097624	PN Karawang	10.823.412.000	10,662,455,059 (98.51 %)	160.956.941
10	097631	PN Subang	6.850.837.000	6,729,441,793 (98.23 %)	121.395.207
11	097645	PN Bogor	12.520.201.000	12,358,898,501 (98.71 %)	161.302.499
12	097652	PN Sukabumi	5.455.685.000	5,438,212,700 (99.68 %)	17.472.300
13	097666	PN Cianjur	6.481.472.000	6,273,720,518 (96.79 %)	207.751.482
14	097670	PN Cirebon	7.138.290.000	7,059,020,096 (98.89 %)	79.269.904
15	097687	PN Indramayu	6.881.443.000	6,817,466,352 (99.07 %)	63.976.648
16	097691	PN Majalengka	5.051.040.000	4,968,631,608 (98.37 %)	82.408.392
17	097709	PN Kuningan	5.287.969.000	5,111,909,004 (96.67 %)	176.059.996
18	400409	PN Cibadak	5.524.768.000	5,142,889,763 (93.09 %)	381.878.237
19	400477	PN Sumber	8.566.876.000	8,499,846,424 (99.22 %)	67.029.576
20	400483	PN Bale Bandung	13.645.655.000	13,512,433,968 (99.02 %)	133.221.032
21	401914	PN Banjar	23.945.399.000	23,784,250,489 (99.33 %)	161.148.511
22	401915	PN Cikarang	6.956.161.000	6,686,082,991 (96.12 %)	270.078.009
23	477292	PN Depok	11.477.457.000	11,378,069,171 (99.13 %)	99.387.829
24	613519	PN Cibinong	15.196.300.000	14,876,005,824 (97.89 %)	320.294.176

Table 39. LRA DIPA 01 TA 2024 Se Wilayah Jawa Barat

No	kode Satker	Nama Satker	Nilai Pagu	Nilai Realisasi	Sisa Pagu
1	099067	Pengadilan Tinggi Bandung (03)	555.860.000	554,776,351 (99.81 %)	1.083.649
2	099068	PN Bandung (03)	1.055.310.000	1,050,216,502 (99.52 %)	5.093.498
3	099069	PN Sumedang (03)	154.860.000	151,037,800 (97.53 %)	3.822.200
4	099071	PN Tasikmalaya (03)	151.240.000	147,054,560 (97.23 %)	4.185.440
5	099072	PN Garut (03)	300.879.000	290,620,345 (96.59 %)	10.258.655

6	099073	PN Ciamis (03)	132.515.000	129,114,600 (97.43 %)	3.400.400
7	099078	PN Purwakarta (03)	206.170.000	201,125,900 (97.55 %)	5.044.100
8	099079	PN Bekasi (03)	453.850.000	449,457,746 (99.03 %)	4.392.254
9	099080	PN Karawang (03)	150.010.000	143,475,568 (95.64 %)	6.534.432
10	099081	PN Subang (03)	318.223.000	317,811,375 (99.87 %)	411.625
11	099082	PN Bogor (03)	144.262.000	143,055,287 (99.16 %)	1.206.713
12	099083	PN Sukabumi (03)	187.200.000	185,728,160 (99.26 %)	1.391.840
13	099084	PN Cianjur (03)	196.200.000	194,357,000 (99.06 %)	1.843.000
14	099085	PN Cirebon (03)	146.700.000	143,816,850 (98.03 %)	2.883.150
15	099086	PN Indramayu (03)	200.750.000	200,286,500 (99.77 %)	463.500
16	099088	PN Majalengka (03)	112.280.000	107,842,945 (96.05 %)	4.437.055
17	099089	PN Kuningan (03)	204.778.000	183,052,500 (89.39 %)	21.725.500
18	400410	PN Cibadak (03)	170.978.000	165,214,381 (96.63 %)	5.763.619
19	400478	PN Sumber (03)	185.100.000	184,286,000 (99.56 %)	814.000
20	400484	PN Bale Bandung (03)	350.140.000	329,568,000 (94.12 %)	20.572.000
21	402022	PN Banjar (03)	75.140.000	71,378,096 (94.99 %)	3.761.904
22	40	PN Cikarang (03)	351.450.000	348,124,419 (99.05 %)	3.325.581
23	477293	PN Depok (03)	365.940.000	360,842,280 (98.61 %)	5.097.720
24	613520	PN Cibinong (03)	457.140.000	452,236,300 (98.93 %)	4.903.700

2. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Table 40. Oengelolaan Barang Milik Negara

NO.	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Menginput Dokumen Belanja Barang di Aplikasi Persediaan DIPA BUA (01)	5 Dokumen	
2.	Menginput Dokumen Belanja Modal di Aplikasi SAKTI DIPA BUA (01)	-	
3.	Menginput Dokumen Belanja Barang di Aplikasi Persediaan DIPA BADILUM (03)	11 Dokumen	
4.	Membuat Berita Acara Stock Opname Semesteran DIPA BUA (01)	2 BeritaAcara	
5.	Membuat Berita Acara Stock Opname Semesteran DIPA BADILUM (03)	2 BeritaAcara	
6.	Mengelola Penghapusan BMN Pengadilan Tinggi Bandung	-	

7.	Mengelola Penghapusan BMN Satker Wilayah Jawa Barat	30 Laporan	
8.	Mengelola Penetapan Status Penggunaan BMN Pengadilan Tinggi Bandung	1 Laporan	
9.	Mengelola Penetapan Status Penggunaan BMN Satker Wilayah Jawa Barat	14 Laporan	
10.	Mengelola Pemanfaatan BMN Satker Wilayah Jawa Barat	41 Laporan	
11.	Mengelola Usulan Hibah BMN Wilayah Jawa Barat (Berupa Uang dan Barang)	109 Dokumen	
12.	Mengelola Usulan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) BMN	-	
13.	Mengelola Asuransi BMN Wilayah Jawa Barat	25 Laporan	
14.	Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) PT BANDUNG	1 Laporan	
15.	Mengelola Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	2 Laporan	
16.	Permohonan Alih Status BMN Wilayah Jawa Barat	1 Laporan	
17.	TKTM Buku Register Satker Wilayah Jawa Barat	24 Laporan	

3. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pada dasarnya, penerimaan Negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**.

Kelompok PNBP meliputi :

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaandari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

Table 41. PNBP Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099078	PN PURWAKARTA	38.330.000	51.230.000	0	51.230.000	1,34
099083	PN SUKABUMI	19.193.000	16.903.000	0	16.903.000	0,88
099085	PN CIREBON	31.121.000	38.068.500	0	38.068.500	1,22
099079	PN BEKASI	349.864.000	225.682.900	0	225.682.900	0,65
099068	PN BANDUNG	561.670.000	478.959.187	0	478.959.187	0,85
099084	PN CIANJUR	39.572.000	34.650.000	0	34.650.000	0,88
099089	PN KUNINGAN	18.401.000	14.526.500	0	14.526.500	0,79
099081	PN SUBANG	31.682.000	31.438.500	0	31.438.500	0,99
400484	PN BALE BANDUNG	168.518.000	176.340.502	0	176.340.502	1,05
613520	PN CIBINONG	165.761.000	227.713.500	0	227.713.500	1,37
099071	PN TASIKMALAYA	58.679.000	66.594.000	0	66.594.000	1,13
099073	PN CIAMIS	22.475.000	33.483.000	0	33.483.000	1,49
099072	PN GARUT	9.159.000	43.020.500	0	43.020.500	4,7
099069	PN SUMEDANG	98.293.000	36.131.000	0	36.131.000	0,37
099067	PT BANDUNG	28.650.000	22.080.000	0	22.080.000	0,77
099080	PN KARAWANG	91.839.000	103.289.500	0	103.289.500	1,12
402022	PN BANJAR	7.980.000	10.761.500	0	10.761.500	1,35
099082	PN BOGOR	73.731.000	118.547.500	0	118.547.500	1,61
099088	PN MAJALENGKA	14.288.000	20.677.500	0	20.677.500	1,45
402023	PN CIKARANG	102.614.000	137.651.000	0	137.651.000	1,34
400478	PN SUMBER	3.821.000	50.994.500	0	50.994.500	13,35
099086	PN INDRAMAYU	20.953.000	29.636.500	0	29.636.500	1,41
477293	PN DEPOK	187.196.000	237.867.500	0	237.867.500	1,27
400410	PN CIBADAK	23.998.000	23.926.000	0	23.926.000	1,0
	JUMLAH	2.167.788.000	2.230.172.589	0	2.230.172.589	1,03

4. TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)

Untuk pertama kalinya Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) di lingkungan Mahkamah Agung RI diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang peradilan dan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja bagi pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya, maka perlu dilakukan penyesuaian Tunjangan Khusus Kinerja, sehingga dibuatlah Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan terbaru adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

*Table 42. Tunjangan Kinerja Pegawai (remunerasi)
(Dalam Rupiah)*

NO	PERIODE	JUMLAH NETTO	PPH	JUMLAH BRUTO
1	JANUARI	544.182.180	42.968.851	587.151.031
2	KEKURANGAN JANUARI	25.236.871	1.573.129	26.810.000
3	FEBRUARI	571.722.937	45.803.437	617.526.374
4	MARET	556.668.540	47.355.741	604.024.281
5	THR	567.624.000	102.850.632	670.474.632
6	APRIL	537.495.236	45.441.221	582.936.457
7	MEI	546.007.702	46.295.528	592.303.230
8	KE - 13	549.382.000	93.635.062	643.017.062
9	JUNI	562.677.266	45.279.062	607.956.328
10	KEKURANGAN JUNI	12.159.126	240.930	12.400.056
11	JULI	555.525.251	44.792.282	600.317.533
12	AGUSTUS	547.013.377	43.678.242	590.691.619
13	KEKURANGAN AGUSTUS	12.189.600	242.376	12.431.976
14	SEPTEMBER	555.724.846	44.735.005	600.459.851
15	OKTOBER	542.342.356	43.818.846	586.161.202
16	NOVEMBER	533.377.675	42.989.588	576.367.263
17	DESEMBER	529.131.337	43.894.163	573.025.500
TOTAL		7.748.460.300	735.594.095	8.484.054.395

Table 43. Rekapitulasi Transport Hakim

NO	PERIODE	JUMLAH
1	JANUARI	41.805.000
2	FEBRUARI	31.140.000
3	MARET	35.074.000
4	APRIL	28.710.000
5	MEI	33.255.000
6	JUNI	29.340.000
7	JULI	44.613.000
8	AGUSTUS	49.514.000
9	SEPTEMBER	41.490.000
10	OKTOBER	48.330.000
11	NOVEMBER	40.076.000
12	DESEMBER	30.600.000
TOTAL		453.947.000

5. PENGELOLAAN PELAPORAN

1. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Semester I.
2. LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.
3. Laporan SIMAN dan E-Sadewa.
4. Laporan Hibah dan E-Sehati.
5. Laporan WASDAL.

6. PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Tahun 2024 : 189 surat
Surat Keluar Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Tahun 2024 : 360 surat

7. PENGHARGAAN

Penghargaan yang diterima Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Tahun 2024

adalah sebagai berikut:

Table 44. Penghargaan Bagian Keuangan TA 2024.

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL	DOKUMENTASI
1.	Penghargaan Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA_W). Kategori Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan Tahunan Yang Berkualitas TA 2023 dengan Jumlah 19 s/d 36 UAKPA	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI	22 Januari 2024	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

a. Bangunan Kantor Permanen, Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Bandung Bandung ;

- Letak di Jalan Jl. Cimuncang No.21D, Padasuka, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125
- Luas Tanah : 4.000 m²
- Luas Bangunan/Jumlah Lantai : 3.026,60 M²/3 (tiga)

b. Bangunan gedung tempat Ibadah Permanen

Letak di Jalan Cimuncang No.21D, Padasuka, Cibeunying Kidul, Kota Bandung,

Jawa Barat 40125

- Luas Bangunan/Jumlah Lantai : 45 m²/2 (dua)
- Sumber Dana : Bantuan Pemprov Jabar dan Swadaya

c. Nama Tempat Ibadah : Mesjid Al-Mizan

c. Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen.

Letak di Jalan Cimuncang No.21D, Padasuka, Cibeunying Kidul, Kota Bandung,

Jawa Barat 40125, Luas Bangunan/Jumlah Bangunan: 3 m² terdiri dari 2 (dua) Unit Bangunan.

2. Rumah Dinas Tempat Tinggal Golongan

Jumlah keseluruhan Tempat Tinggal 20 Unit sebagai berikut :

Table 45. Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Bandung.

NO	NAMA BMN	TAHUN PEROLEHAN	LUAS M2	ALAMAT
1	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1972	200	JL. Lombok No. 34 Cihapit Bandung
2	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1973	120	JL. Taman Cibunut No. 12 Kebon Pisang Bandung
3	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1977	129	JL. Banteng Dalam No. 21 Turangga Bandung
4	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1982	120	JL. Batu Indah VI No. 4 Batununggal Bandung
5	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1978	120	JL. Reog III No. 4 Turangga Bandung
6	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1978	120	JL. Reog III No. 6 Turangga Bandung
7	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1978	120	JL. Reog III No. 2 Turangga Bandung
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2014	54	JL. Reog III No.1a Turangga Bandung
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2014	54	JL. Reog III No.1b Turangga Bandung
10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2014	54	JL. Reog III No.1c Turangga Bandung
11	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1978	120	JL. Reog IV No. 2 Turangga Bandung
12	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2014	54	JL. Reog IV No. 2a Turangga Bandung
13	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1981	120	JL. Parakan Asri Raya No. 38 Batununggal Bandung
14	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1982	120	JL. Batu Indah VI No. 2 Batununggal Bandung
15	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1981	70	JL. Parakan Asri Raya No. 38 A Batununggal Bandung

16	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1986	70	JL. Cisaranten Kulon No. 83 Arcamanik Bandung
17	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1986	120	JL. Cisaranten Kulon No. 84 Arcamanik Bandung
18	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1986	70	JL. Cisaranten Kulon No. 82 Arcamanik Bandung
19	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1986	70	JL. Cisaranten Kulon No. 81 Arcamanik Bandung
20	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1986	120	JL. Cisaranten Kulon No. 85 Arcamanik Bandung

3. Kendaraan Dinas pada Pengadilan Bandung

Table 46. Daftar Kendaan Dinas Pengadilan Tinggi Bandung

NO.	NAMA BMN	TAHUN PEROLEHAN	DOKUMEN	MERK/TYPER	WARNA/MODEL	KONDISI	KET
1	Sedan	2004	BPKB No. C.7988721-H	Toyota Camry No.Pol D 4 No.Rangka MHF53BK30440020 73 No.Mesin 2AZ-3090860	Hitam/sedan	Baik	Pemda Jabar
2	Sedan	2010	BPKB No. H.06992789	Toyota Camry No.Pol D 1644 F No.Rangka MR0538K40A90096 12 No.Mesin 2AZE190614	Hitam/sedan	Baik	Hibah APBD Jabar
3	Sedan	2010	BPKB No. H.07223404	Toyota Vios No.Pol D 1314 F No.Rangka KR053HY93890188 73 No.Mesin 1NZX863832	Hitam/sedan	Baik	Transfer masuk MA-RI
4	Jeep	2010	BPKB No. H.06696432	Toyota Fortuner G.Luxury No.Pol D 1641 F No.Rangka MHFZX69G4A7020 268 No.Mesin 2TR7015003	Hitam/SUV	Baik	Hibah APBD Jabar
5	Station Wagon	2009	BPKB No. F-8527766-H	Toyota Avanza 1500 S No.Pol D 1345 F No.Rangka MHFM1CA4J9K023 972 No.Mesin DBG0997	Hitam/MPV	Baik	APBN PT.BDG 2009
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	BPKB No. H.06605134	Toyota Avanza G 1300 No.Pol D 1640 F No.Rangka MHFM1BA3JAK72303 9 No.Mesin DG46160	Hitam/MPV	Baik	Hibah APBD Jabar

7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2011	BPKB No. I01309440	Toyota Innova VM/T No.Pol D 1794 F No.Rangka MHFXW43G8B405 8029 No.Mesin 1TR-7139313	Hitam/MPV	Baik	DIPA BUA 2011
8	Sedan	2011	BPKB No. I06904629	Toyota Corrolla Altis 1.8 M/T B 1472 HQ No.Rangka MR053REE2B4301 575 No.Mesin 2ZRX134218	Hitam Metalik /sedan	Baik	Transfer Masuk dari MA-RI
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2011	BPKB No. I01309440	Toyota Innova VM/T No.Pol D 1794 F No.Rangka MHFXW43G8B405 8029 No.Mesin 1TR-7139313	Hitam/MPV	Baik	DIPA BUA 2011
10	Sedan	2011	BPKB No. I06904629	Toyota Corrolla Altis 1.8 M/T B 1472 HQ No.Rangka MR053REE2B4301 575 No.Mesin 2ZRX134218	Hitam Metalik /sedan	Baik	Transfer Masuk dari MA-RI
11	Sepeda Motor	2008	BPKB No. E-9718914-H	Honda Mega Pro 160 CW No.Pol D 6181 D No.Rangka MH1KC12138KO92 632 No.Mesin KC12E1092537	Hitam/Roda dua	Baik	APBN
12	Sepeda Motor	2011	BPKB No. H-10775142	Honda New Mega Pro No.Pol D 2199 E No.Rangka MH1KC3111BK091 029 No.Mesin KC31E-1092495	Hitam/Roda dua	Baik	APBN
13	Sepeda Motor	2005	BPKB No. D.7428208-H	Honda Mega Pro CW No.Pol D 4286 C No.Rangka MH1KEHP185KO39 853 No.Mesin KEHPE1039981	Hitam/Roda dua	Baik	APBN
14	Sepeda Motor	2007	BPKB No. E.4929095-H	Honda Mega Pro CW No.Pol D 5754 D No.Rangka MH1KC111X7K072 362 No.Mesin KC11E1071681	Hitam/Roda dua	Baik	APBN

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Bandung dan 23 (Dua Puluh Tiga) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung seluruhnya telah menerapkan

E-Court. Rincian jumlah perkara pada Pengadilan negeri yang didaftarkan melalui ecourt, dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Table 47. Daftar Rincian Jumlah Perkara E-Court

No.	Satuan Kerja	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan	PHI
1	PN Bale Bandung	1042	1042	320	135	2	585	0
2	PN Bandung	2243	2071	559	209	32	1,054	217
3	PN Banjar	54	54	4	21	0	29	0
4	PN Bekasi	1,470	1,402	644	68	17	673	0
5	PN Bogor	570	557	225	74	17	284	0
6	PN Ciamis	246	226	19	76	5	126	0
7	PN Cianjur	289	282	54	20	0	208	0
8	PN Cibadak	147	147	48	45	0	54	0
9	PN Cibinong	1,489	1,432	521	60	13	838	0
10	PN Cikarang	873	873	310	74	2	487	0
11	PN Cirebon	243	243	82	13	6	142	0
12	PN Depok	1,184	1,184	415	48	17	704	0
13	PN Garut	362	362	38	91	0	233	0
14	PN Indramayu	318	318	66	83	9	160	0
15	PN Karawang	730	721	165	85	0	471	0
16	PN Kuningan	115	108	19	20	1	68	0
17	PN Majalengka	193	189	17	48	0	124	0
18	PN Purwakarta	536	524	59	28	2	435	0
19	PN Subang	249	234	56	39	4	135	0
20	PN Sukabumi	144	132	42	11	1	78	0
21	PN Sumber	284	239	81	55	4	99	0
22	PN Sumedang	155	155	55	4	0	96	0
23	PN Tasikmalaya	378	368	72	78	7	211	0
Jumlah		13,314	12,863	3,871	1,385	139	7,294	217

2. IMPLEMENTASI SIPP

Untuk peningkatan pelayanan public menuju layanan prima, Pengadilan tinggi Bandung telah memanfaatkan sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat menuju birokrasi bebas korupsi, bersih dan melayani serta professional dalam memberikan pelayanan yang optimal, bermartabat, transparan dan akuntabel, hal ini

sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berikut sarana dan fasilitas teknologi indormasi yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Bandung:

a. Perangkat Keras

Table 48. Perangkat Server

NO	PERANGKAT	KUANTITAS
1	Bandwidth (Main Link)	300Mbps
2	Bandwidth (Backup Link)	200Mbps
2	Rak Server	2 Set
3	Server	4 Unit
4	Mikrotik (RB1100AHx2)	1 Unit
5	Mikrotik (CRS112-8G-4S)	3 Uni
6	Bank Data (1)	4 Terrabytes
7	Bank Data (2)	2 Terrabytes
8	Bank Data (3)	2 Terrabytes
8	PC	112 Unit
9	Laptop	66 Unit

b. Perangkat Lunak

- Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding (SIPP Tingkat Banding)
- Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI
- Aplikasi SIPAPU BADILUM
- Aplikasi EIS Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
- Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
- Aplikasi Persuratan Elektronik
- Aplikasi PERKUSI Badilum
- Aplikasi E-Peduli
- Aplikasi IKA/Monika
- Aplikasi e-Bisa

- Aplikasi ATAP
- Aplikasi Makinsip
- Aplikasi E-Cakra
- Aplikasi SIPA
- Aplikasi Pelayanan (Dilan)

Seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung telah mengimplementasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 5.6.0. Penilaian implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel dibawah ini:

Table 49. Penilaian Implementasi SIPP

No	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	
1	>2000	IA Khusus	PN Bandung	92%	97%	98%	89%	94.12% (940.06)
2	>2000	IA Khusus	PN Bekasi	93%	97%	96%	83%	92.23% (925.56)
3	>2000	IA	PN Bale Bandung	96%	98%	88%	86%	91.85% (920.84)
4	>2000	IA	PN Cibinong	88%	98%	91%	84%	90.06% (895.08)
5	1~500	II	PN Kuningan	96%	99%	94%	94%	96.02% (914.08)
6	1~500	II	PN Majalengka	100%	88%	92%	83%	90.70% (833.71)
7	1~500	IB	PN Ciamis	96%	94%	75%	78%	85.65% (827.86)
8	1~500	II	PN Banjar	96%	80%	70%	51%	74.43% (703.16)
9	1001~2000	IA	PN Depok	94%	96%	92%	88%	92.43% (912.51)
10	1001~2000	II	PN Cikarang	93%	94%	90%	81%	89.52% (886.67)
11	1001~2000	IB	PN Karawang	96%	82%	86%	71%	83.84% (784.62)
12	501~1000	IA	PN Tasikmalaya	96%	100%	93%	99%	96.95% (971.05)
13	501~1000	IB	PN Subang	96%	100%	95%	85%	94.03% (890.37)
14	501~1000	IB	PN Sukabumi	96%	98%	92%	84%	92.61% (903.00)
15	501~1000	IB	PN Sumedang	96%	98%	78%	96%	91.95% (899.24)
16	501~1000	IB	PN Cibadak	96%	95%	94%	80%	91.23% (881.54)
17	501~1000	IA	PN Bogor	94%	99%	77%	91%	90.17% (904.54)
18	501~1000	IA	PN Sumber	91%	99%	81%	83%	88.73% (895.28)
19	501~1000	IB	PN Indramayu	76%	99%	82%	94%	87.54% (872.74)
20	501~1000	IB	PN Cianjur	93%	75%	98%	82%	87.03% (798.58)
21	501~1000	IB	PN Purwakarta	96%	99%	74%	77%	86.60% (871.19)
22	501~1000	IB	PN Cirebon	88%	94%	91%	69%	85.60% (826.74)
23	501~1000	IB	PN Garut	35%	15%	17%	17%	21.03% (173.84)



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- A. Akreditasi Penjaminan Mutu.**
 - B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**
 - C. Inovasi Pelayanan Publik.**
- 

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam upaya peningkatan pelayanan public demi mewujudkan visi Badan Peradilan yang Agung Pengadilan Tinggi Bandung melaksanakan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). AMPUH merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh, sekaligus melaksanakan Reformasi Birokrasi yang telah menjadi agenda nasional, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerjemahkan Cetak Biru dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of Courts Excellence) sebagai langkah pembaruan yang taktis dan sistematis.

Kerangka pengadilan yang unggul ini terdiri dari 7 (tujuh) area “Peradilan yang Unggul” yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- I. Fungsi pengarah/Pengendali (Driver) adalah area:
 1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan
- II. Fungsi sistem dan penggerak (System and Enabler), berada dalam area:
 2. Kebijakan-kebijakan pengadilan
 3. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan
 4. Penyelenggaraan persidangan
- III. Fungsi hasil (result) dalam area:
 5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan
 6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau
 7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang unggul (court excellence framework) sebagai kerangka pikir dan kerja yang telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Table 50. Daftar Penilaian AMPUH Se- Wilayah Jawa Barat

NO	NAMA PENGADILAN	TIPE KELAS PENGADILAN	NILAI AMPUH
1.	PT Bandung	Type A	886,84 (UNGGUL)
2	PN Bandung	IA Khusus	790,97(UTAMA)
3	PN Bekasi	IA Khusus	704,61 (BAIK)
4	PN Bale Bandung	IA	818,05 (UTAMA)
5	PN Cibinong	IA	815,83 (UTAMA)
6	PN Depok	IA	815,06(UTAMA)
7	PN Sumber	IA	816,4 (UTAMA)
8	PN Indramayu	IA	789,97 (UTAMA)
9	PN Tasikmalaya	IA	825,50 (UTAMA)
10	PN Bogor	IA	825,66 (UTAMA)
11	PN Cianjur	IB	798,94 (UTAMA)
12	PN Cirebon	IB	789,47 (UTAMA)
13	PN Purwakarta	IB	786,04 (UTAMA)
14	PN Karawang	IB	797,39 (UTAMA)
15	PN Sukabumi	IB	787,30 (UTAMA)
16	PN Cibadak	IB	789,77 (UTAMA)
17	PN Garut	IB	790,35 (UTAMA)
18	PN Ciamis	IB	788,06 (UTAMA)
19	PN Sumedang	IB	787,64 (UTAMA)
20	PN Subang	IB	797,23 (UTAMA)
21	PN Majalengka	II	789,13 (UTAMA)
22	PN Kuningan	II	795,29 (UTAMA)
22	PN Banjar	II	786,88 (UTAMA)
24	PN Cikarang	II	789,57 (UTAMA)

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Tahun 2018, mengawali Pelayanan Terpadu Satu Pintu diterapkan di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SH02.3/2/2018, dan kini telah berjalan selama 7 tahun dan telah mengalami banyak perkembangan.

Pada PTSP Generasi pertama ini seluruh layanan dilayani secara tatap muka secara langsung, dimana para pengguna layanan yaitu para pencari

keadilan berkontak langsung secara fisik, hal tersebut masih dirasa kurang memenuhi aspek pencegahan korupsi.

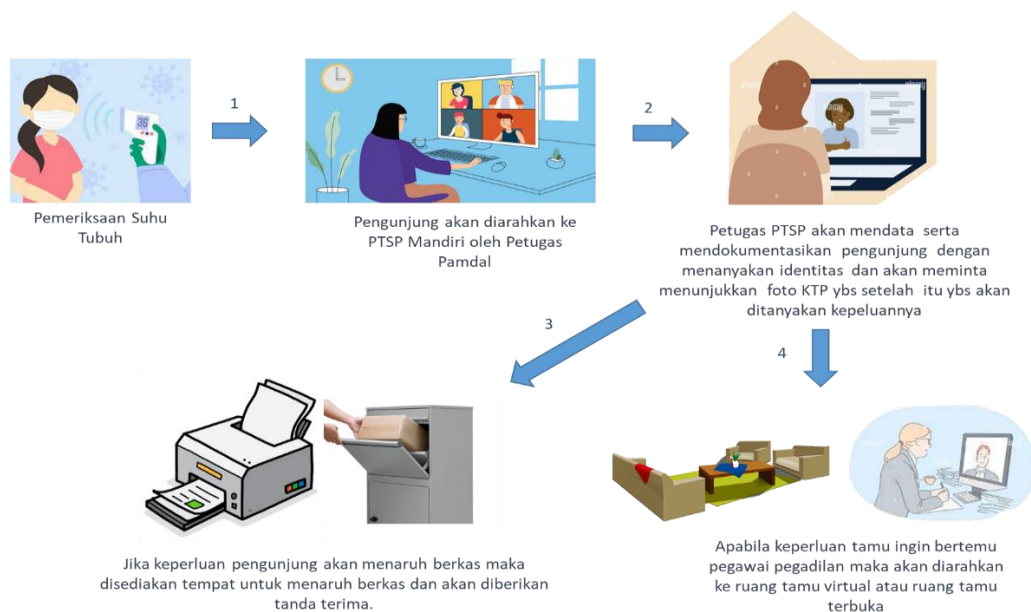
Pada tahun 2021 tepatnya tanggal 6 Januari 2021, Pengadilan Tinggi Bandung meresmikan PTSP Generasi ke II, yaitu PTSP Mandiri, dimana PTSP Mandiri ini menjawab tantangan Pencegahan Korupsi dan juga sekaligus menjawab tantangan layanan ditengah-tengah *Pandemic COVID-19* yang sedang berada pada puncaknya.

Sehingga layanan pengadilan kepada masyarakat para pencari keadilan dapat berlangsung dengan baik, aman dan memperhatikan standar pencegahan *Pandemic COVID-19*.

Kemudian dalam pidato dan penyampaian **Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI** tahun 2023 yang secara langsung disampaikan oleh YM Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, bahwa PTSP Mandiri menjadi bagian dari program Mahkamah Agung RI agar dapat di implementasikan baik di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh badan peradilan di bawahnya.

Berikut Alur Pelayanan PTSP Mandiri

1. Alur Pelayanan PTSP Mandiri :



2. Dokumentasi Anjungan PTSP Mandiri :



PTSP Mandiri Front Office



PTSP Back Office



Tempat Penyerahan dan
Penerimaan Berkas



Proses Registrasi Tamu



Panmud Pidana Menerima Tamu
Secara Virtual



Ruang Tamu Virtual dan R. Tamu
Terbuka

3. PTSP Generasi Ke 3 (Tiga) PTSP Digital Melayani

a. Latar Belakang :

Pelayanan Digital Secara Cepat adalah merupakan perwujudan Komitmen Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dalam Pembangunan Zona Integritas, dimana Pengadilan Tinggi Bandung selalu berusaha dan berupaya agar Pengadilan Tinggi Bandung dan seluruh Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya menjadi Wilayah Birokrasi Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Pelayanan Digital Secara Cepat telah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 1 Maret 2023 dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

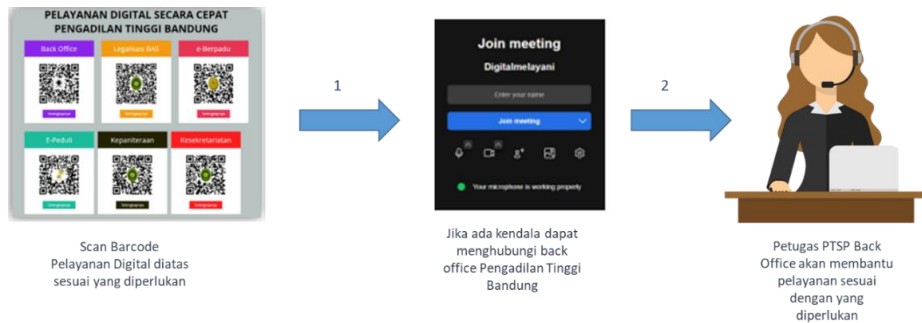
b. Tujuan :

Meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung

c. Manfaat :

- i. Menghemat waktu dalam proses pendaftaran legalisasi BAS.
- ii. Dokumen terserip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- iii. Dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.

d. Alur Penggunaan DILAN :



e. Dokumentasi DILAN :



C. Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung memiliki beberapa inovaso-inovasi layanan, baik layanan secara internal maupun external, berikut daftar Inovasi Layanan.:

Table 51. Daftar Layanan Inovasi.

NO	NAMA SATKER	NAMA INOVASI	KETERANGAN
1	PN BALE BANDUNG	- Kabayan Silat.	Aplikasi Layanan Chat melalui media Whatsapp, sehingga para pencari keadilan dapat berkomunikasi dan menerima informasi dengan cepat dan mudah.
		- Notifikasi Kang Adil	Inovasi notifikasi bagi pengguna layanan pengadilan berbasis telegram.
		- Inovasi Penelitian Online	Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomena hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan di terbitkan pertama kali pada tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung. Keadilan : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan , terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yakni pada Bulan September dan Maret . e-ISSN : 3026-2267.
		- E-Brosur	Menghadapi era digital ini Pengadilan Negeri Bale Bandung tentunya terus berkembang mengikuti perkembangan jaman, dimana saat ini akses digital sangat massif di gunakan oleh masyarakat, sehinga informasi berbentuk brosur fisik kini bertransformasi menjadi e-brosur, sehingga mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

2	PN BANDUNG	- KANG DILAN	Dalam rangka meningkatkan pelayanan excellent terhadap pengguna layanan pengadilan, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bandung telah membuat inovasi layanan virtual untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ingin mengetahui bentuk-bentuk layanan, tata cara mengajukan layanan dan persyaratan yang harus dilengkapi melalui platform whatsapp dan telegram. Inovasi ini bernama Kang Dilan “Kabar dan Informasi tentang Layanan Pengadilan”
		- LAYANAN KONSULTASI HUKUM 24 JAM	Layanan line telephone selama 24 jam telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Bandung melalui Pos Bantuan Hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berinteraksi langsung untuk mendapatkan advice hukum. Sehingga kapan pun di manapun masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan
		- PRIORITY	Selain inovasi layanan yang berbentuk aplikasi, Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan Kerjasama dengan Yayasan Penyandang Disabilitas BILIC Bandung dan SAPDA untuk memudahkan pelayanan yang membutuhkan penterjemah Bahasa isyarat, huruf braile dan kebutuhan khusus lainnya bagi penyandang disabilitas
		- SIPANDU	Sipandu (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu) merupakan layanan pengawasan yang mengintegrasikan hasil pengawasan bidang dengan eviden Zona Integritas dan Akreditasi Penjaminan Mutu, bertujuan untuk memangkas pekerjaan yang sama
		- RUANG TAMU VIRTUAL	Ruang tamu virtual yang berada di Kawasan umum (zona non steril) merupakan ruangan yang dilengkapi dengan peralatan memadai yang dapat memungkinkan para tamu pengunjung untuk bertemu dengan aparatur pengadilan secara virtual melewati prosedur yang ditetapkan oleh petugas informasi yang berjaga
		- BARCODE LAYANAN	Pengunjung Pengadilan yang hanya sekedar membutuhkan informasi seputar layanan dapat memanfaatkan Barcode layanan di Meja Informasi dan ruang PTSP untuk mencegah panjangnya antrian pelayanan

3	PN BEKASI	AVIASI	Asisten virtual Pengadilan Negeri Bekasi Berbasis Aplikasi Telegram
4	PN BOGOR	LAYANAN DRIVE THRU	Layanan untuk mengambil Produk Pengadilan Negeri Bogor melalui sistem <i>Drive-Thru</i> alias tanpa harus turun dari mobil/kendaraan
		RUANG SIDANG MODERN BERBASIS IT	Seluruh ruang sidang Pengadilan Negeri Bogor dilengkapi dengan berbagai alat-alat berbasis Teknologi Informasi yang memudahkan Hakim serta pihak dan juga pengunjung yang ikut dalam persidangan
		APLIKASI HAKIM PENGAWAS BIDANG	Aplikasi untuk para Hakim Pengawas Bidang untuk membuat laporan hasil pengawasan pada aplikasi. untuk mendukung konsep paperless
		MOBIL PASTI JADI (Pengadilan Siap Antar Jemput Kaum Difabel)	Mobil Operasional Pengadilan Negeri Bogor yang dijadikan untuk antar jemput kaum disabilitas apabila ada yang membutuhkan
		ARSIP DIGITAL	Inovasi bagian kepaniteraan untuk membuat backup file-file perkara dan kepaniteraan
		SIDORAZI	Sistem Informasi Dokumen RB, APM dan ZI. untuk penyimpanan file-file tersebut pada aplikasi yang dilakukan secara online
		SIWA (Sistem Informasi Melalui Whatsapp)	Aplikasi untuk menjawab pertanyaan secara otomatis melalui Whatsapp pada Pengadilan Negeri Bogor

		MALL PELAYANAN PUBLIK	Pengadilan Negeri Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor membuka pelayanan pada Mall Pelayanan Publik Kota Bogor bertempat di Graha Tirtayasa di Jl. Pajajaran, Kota Bogor. Masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan seperti yang dilayani di PTSP pada Mall Pelayanan Publik
5	PN CIAMIS	- Aplikasi Si Iteung	Sistem informasi yang memberikan layanan berupa pesan whatsapp kepada para pihak yang terkait dalam proses perkara yang terdiri dari informasi pendaftaran perkara baik Pidana maupun E-Court Perdata, jadwal persidangan, keuangan perkara, juga reminder update pengisian Aplikasi SIPP, informasi tilang serta informasi perkara lainnya
		- PTSP Online	salah satu inovasi pada Pengadilan Negeri Ciamis Sebagai upaya untuk mewujudkan "Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi". Dengan PTSP Online masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan petugas PTSP pada pelayanan meja Pidana Perdata, Hukum dan Umum melalui pesan whatsapp atau video call tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Ciamis sehingga lebih efektif dan efisien.
		- Video layanan Disabilitas	Inovasi yang menggunakan media video digital untuk membantu kaum disabilitas agar mudah mendapatkan informasi mengenai alur di PTSP.alur mediasi,dan alur berperkara.
6	PN CIANJUR	- SIMANJUR	Sistem informasi Pengadilan negeri cianjur berbasis whatsapp untuk mengetahui layanan yang ada di pengadilan negeri cianjur
		- AMBU	Aplikasi Masuk buku tamu (AMBU) untuk mengetahui banyaknya pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Cianjur disertai dengan Assasement untuk layanan disabilitas
7	PN CIBADAK	- Aplikasi Lorong Akses	Aplikasi Berbasis Apk Android Untuk Memudahkan Setiap Pegawai PN Cibadak dalam Mengakses Seluruh sistem Informasi Internal secara Mobile.

		- Aplikasi Teh Vira	Aplikasi Virtual Assistant yang dapat memberikan layanan Informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan secara Virtual
		- Aplikasi Bank SK	Sistem Informasi Internal PN Cibadak, yang memfasilitasi Penyimpanan Dokumen SK Secara Digital yang bisa di akses oleh seluruh Pegawai PN Cibadak.
		- e-Banner	Inovasi Infografis Banner berbentuk digital, yang menggantikan penggunaan Informasi melalui banner Konvensional
		- Medinfo PN Cibadak	Aplikasi Berbasis Apk Android Untuk Memudahkan Setiap Masyarakat dalam Mengakses Informasi yang dibutuhkan pada PN Cibadak dimanapun dan kapan saja
		- APPTI (Aplikasi Pemeliharaan Perangkat TI)	Aplikasi Berbasis Web untuk mengelola Pemeliharaan Perangkat TI di PN Cibadak yang menggantikan proses perawatan perangkat sistem Kartu Kontrol Manual.
		- Video Layanan Disabilitas	Inovasi yang menggunakan media video digital untuk membantu kaum disabilitas agar mudah mendapatkan informasi mengenai alur di PTSP.alur mediasi,dan alur berperkara dengan bahasa Isyarat
		- Kartu Pengunjung Prioritas	Kartu Antrian Prioritas yang diperuntukan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam mendapatkan pelayanan PTSP PN Cibadak dengan tujuan memperoleh kemudahan akses pelayanan tanpa perlu menunggu antrian umum
		- QR Code Sarana Bagi Penyandang Disabilitas	Inovasi Infografis yang menyajikan list Peralatan Disabilitas yang di sediakan PN Cibadak
8	PN CIBINONG	- Si Vira	Si Vira bisa membantu memberikan informasi terkait perkara maupun informasi-informasi terkait proses dan administrasi pengadilan.

		- Aplikasi Antrian Sidang	Aplikasi antrian sidang yang terkoneksi SIPP untuk panggil nama-nama pihak dan untuk notifikasi jadwal sidang H-1 kepada para pihak
		- Aplikasi Monalisa	Aplikasi Monitoring dan Analisa Pimpinan digunakan untuk monitoring IKU, Laporan Realisasi Anggaran, Ketidaktepatan EIS, Capaian IKM dan SKM
		- Buku Braille (Layanan Informasi kepaniteraan)	Layanan informasi kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, dan Kepaniteraan Hukum menggunakan Huruf braille bagi penyandang disabilitas netra.
		- Antrian PTSP Online	Aplikasi Berbasis Web untuk mendaftar antrian PTSP yang bisa dilakukan dimana saja, bisa memilih waktu, hari dan tanggal sesuai kebutuhan pemohon
9	PN CIREBON	SI PECEI (Sistem Informasi Pelayanan PN Cirebon)	SI PECEI merupakan layanan melalui aplikasi Whatsapp yang berguna untuk melayani berbagai macam Informasi yang dibutuhkan masyarakat, terkait Informasi layanan yang terdapat di Pengadilan Negeri Cirebon
		BRO DIG (Brosur Digital)	BRO DIG merupakan brosur layanan PN Cirebon dalam bentuk digital yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun
		DISKA (Digitalisasi Arsip Surat Kuasa)	DISKA merupakan alat bantu digitalisasi arsip dokumen surat kuasa pada Kepaniteraan Hukum PN Cirebon
		PENDEKAR (Pendaftaran Eksekusi Online)	Pendekar Merupakan Aplikasi yang menyediakan Pelayanan Pendaftaran Eksekusi secara online, dan pemohon eksekusi bisa langsung meng Upload persyaratan-persyaratan yang di butuhkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

		TRUSMI Monitoring) (Terus	Merupakan aplikasi untuk memonitoring kinerja SIPP pada Pengadilan Negeri Cirebon
10	PN DEPOK	- RUANG TAMU VIRTUAL	Pencari keadilan yang ingin mencari informasi ataupun publik yang ingin datang ke Pengadilan Negeri Depok dapat melalui Ruang Tamu Virtual. Aparatur Pengadilan Negeri Depok dapat bertemu tamu melalui aplikasi ZOOM dengan ID : 85827868337 dan Passcode: pndepok dengan terlebih dahulu mengisi buku tamu pada link : https://bit.ly/bukutamupndepok
		- SApa PEngguna LAyanan (SAPELA) PN Depok	Sapa PEngguna LAyanan (SAPELA) PN Depok adalah kegiatan menyapa pelanggan guna mengetahui langsung keluhan dan kepuasan pengguna layanan PN Depok
		- NGobrol Pintar (NGOPI) ala PN Depok	NGOPI (NGobrol Pintar) ala PN Depok adalah layanan virtual berupa edukasi, penyampaian informasi dan sesi tanya jawab dengan para pencari keadilan
		- Antar Salinan (ASINAN) PN Depok	ASINAN (Antar Salinan) PN Depok adalah layanan yang diperuntukkan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Depok untuk mendapat Salinan di tempat. Aparatur Pengadilan Negeri Depok yang akan mengantarkan Salinan putusan tersebut sampai ke alamat pengguna layanan Pengadilan Negeri Depok
		- Buku Braille (Pelanggan bagi kaum rentan)	Buku Braille Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Depok untuk membantu memberikan pelayanan pelanggan bagi kaum rentan.
		- Pojok Baca	Pojok Baca Pengadilan Negeri Depok merupakan fasilitas untuk seluruh pelanggan Pengadilan Negeri Depok disela waktu menunggu pelayanan
11	PN GARUT	- SIMAGAR	Sistem Layananan Informasi Pengadilan Negeri Garut aplikasi ini dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan layanan pada Pengadilan Negeri Garut

		-E DIPPA	Elektronik Diversi dan Perpanjangan Penahanan Anak aplikasi ini digunakan untuk permohonan Diversi dan Perpanjangan Penahan Anak secara Elektronik
		- E Brosure	Brosur daftar pelayanan elektronik yang dapat diakses dengan menggunakan barekode
		- E Arsip	Elektronik Arsip Aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data dan dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Garut
		- Buku Layanan Braile	Berupa informasi Layanan yang dicetak dengan Huruf Braile yang dapat digunakan untuk pada Disabilitas mengetahui Layanan yang ada di Pengadilan Negeri Garut
12	PN INDRAMAYU	- Aplikasi Pinterjemah (Pintar Menerjemahkan)	Pinterjemah merupakan aplikasi untuk membantu komunikasi antara petugas PTSP dengan pengguna peradilan penyandang disabilitas
		- Audio book Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audio book PTSP Pengadilan Negeri Indramayu membantu mempermudah penyandang disabilitas terutama tunanetra untuk mengetahui jenis pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Indramayu. dapat diakses melalui https://heyzine.com/flip-book/953e595317.html
		- Prosedur Layanan PTSP dengan huruf Braille	Buku Braille Prosedur Layanan PTSP PN Indramayu untuk membantu memberikan pelayanan kepada pengguna peradilan penyandang disabilitas
		- Pojok Disabilitas	Pojok disabilitas merupakan sarana yang disediakan pengadilan Negeri Indramayu untuk melayani pengguna peradilan penyandang disabilitas
		- Pelita (Pelayanan Informasi Virtual)	Merupakan layanan yang berisi informasi dan pengaduan yang secara otomatis memandu pencari keadilan mengetahui jenis-jenis Produk dan Persyaratan Layanan di Pengadilan Negeri Indramayu.

		- Photobooth	Pengadilan Negeri Indramayu menyediakan spot photobooth untuk pengguna peradilan yang ingin mengambil swafoto di Pengadilan Negeri Indramayu
13	PN KARAWANG	- AVIKAR (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang)	Untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan Informasi seputar Pengadilan Negeri Karawang dengan menghubungi Nomor Whatsapp dan akan mendapatkan informasi seputar Informasi Persidangan, pengingat Jadwal Sidang, informasi Denda Tilang, Informasi Panjar Biaya Perkara, Informasi tentang pidana, perdata, hukum yang akan terjawab otomatis oleh bot.
		- Audio Gratifikasi	Untuk Mengingatkan Peringatan Anti Gratifikasi secara otomatis selama 30 menit sekali dan ada juga Peringatan Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan.
		- E-ASIK	Untuk memudahkan Pegawai Pengadilan Negeri Karawang untuk membuat surat izin keluar dan mengajukan cuti secara online.
		- E-Brosur	Untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan Informasi seputar Pengadilan Negeri Karawang dengan cara Menscan Barcode atau QR dan akan di alihkan ke informasi yang di inginkan.
		- E-Tamu	Pendaftaran Pengujung yang di lengkapi dengan Foto wajah saat melakukan pendaftaran E-Tamu dan memudahkan me manajemen data Pengujung yang datang
		- Video Layanan Informasi	Inovasi menampilkan informasi pengadilan dan di lengkapi dengan bahasa isyarat untuk membantu kaum disabilitas
		- Pojok E-Court	Komputer Pojok e-court merupakan komputer khusus yang di sediakan Pengadilan Negeri Karawang bagi para pencari Keadilan yang ingin melakukan pendaftaran perkara secara elektronik di Kantor Pengadilan Negeri Karawang. Sehingga dengan adanya komputer pojok e-court pendaftaran perkara secara elektronik akan lebih efisien dan cepat.

14	PN KUNINGAN	Gamma-Shai	Pelayanan Perkara Perdata Permohonan Ganti Nama Satu Hari Selesai
		Whatsapp Pengaduan	Pelayanan Pengaduan 24 jam melalui No Whatsapp 087788848868
		Banner Digital	Berisi Informasi Tertulis mengenai Pelayanan yang di berikan di Pengadilan Negeri Kuningan
		Monitor Informasi Kepegawaian	Berisi Informasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Kuningan
		Monitor Informasi	Berisi Tentang Informasi-informasi yang ada di Kepaniteraan maupun di kesekretariatan
		Barcode Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Barcode pada Arsip Perkara dan Arsip Kepegawaian Berfungsi Mempermudah data yang di butuhkan
		Zona Prioritas	Area Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang di bedakan dengan Pengunjung biasa
		Kawal Sidang	Layanan Pemberitahuan jadwal sidang melalui aplikasi Whatsapp bagi para pihak
		Video Layanan disabilitas	Merupakan Inovasi yang menggunakan VIDEO Digital yang sudah dilengkapi dengan bahasa isyarat untuk membantu kaum disabilitas mendapatkan informasi mengenai alur pelayanan di PTSP

15	PN MAJALENGKA	1. siKECAP (si Kompak, Elok, Cepat, Adil, dan Profesional)	<p>siKECAP adalah aplikasi bot whatsapp yang memungkinkan pengguna layanan untuk mencari informasi mengenai perkara, jadwal sidang, dan informasi denda tilang pada Pengadilan negeri Majalengka Kelas II. Adapun nama siKECAP diambil karena KECAP merupakan ikon dan produk unggulan kabupaten Majalengka.</p> <p>Caranya adalah dengan berkirim pesan ke nomor 0899-4394-499 melalui aplikasi Whatsapp. Format pesan yang bisa dijawab oleh siKECAP adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk Informasi perkara, ketik : perkara b. Untuk Informasi Jadwal Sidang, ketik : jadwal sidang c. Untuk Informasi Denda Tilang, ketik : tilang#(nomor register/resi tilang) Contoh : tilang#E123456</p> <p>Nantinya pesan tersebut akan dijawab secara otomatis oleh siKECAP.</p>
		2. ASHIAP (Aplikasi Supervisi Harian PTSP)	<p>ASHIAP adalah aplikasi berbasis google form yang digunakan untuk menginput laporan hasil supervisi harian oleh para Supervisor PTSP pada Pengadilan Negeri Majalengka sesuai Jadwal Supervisi yang telah ditentukan. Dalam laporannya para supervisor diminta untuk menjawab 13 point terkait kesiapan para petugas PTSP dan kesiapan sarana serta prasarana yang ada pada bagian PTSP. Dengan memastikan bahwa petugas dan sarana telah siap, maka Pelayanan kepada para pengguna layanan bisa dilaksanakan dengan maksimal dan terhindar dari kendala-kendala yang bisa menghambat pelayanan pada bagian PTSP.</p> <p>Cara aksesnya adalah dengan membuka link http://ashiap.pn-majalengka.go.id/ sedangkan untuk melihat hasil laporannya adalah dengan mengakses link http://monshiap.pn-majalengka.go.id/ Di dalam laporannya, supervisor juga diharuskan mengupload foto kegiatan pengawasan atau supervisinya pada aplikasi tersebut, dan menuliskan catatan pengawasan atau temuan yang terdapat pada bagian PTSP.</p>

		<p>3. WADUH !! (Aplikasi WA Pengaduan)</p>	<p>WADUH!! Adalah aplikasi yang mengarahkan pengguna layanan untuk mengirim pesan melalui Whatsapp secara otomatis ke petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Majalengka. Aplikasi ini bisa diakses secara online pada link http://waduh.pn-majalengka.go.id : Adapun format pesan yang secara otomatis tercantum saat pengguna membuka link tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>PENGADUAN Nama:<ketik nama anda di sini> NIK:<ketik nomor induk kependudukan / ktp / sim anda di sini> Hal yang diadukan:<ketik perihal yang ingin anda adukan secara lengkap di sini></p> <p>Setelah pengguna layanan selesai mengetik pesannya, maka tekan tombol kirim, pesan tersebut akan langsung terkirim ke Petugas Meja Pengaduan untuk selanjutnya petugas Meja Pengaduan menindaklanjutinya sesuai dengan Prosedur Pengaduan yang sudah ditentukan.</p>
		<p>4. QRISPi (Quick Response Informasi Status Perkara Perdata)</p>	<p>QRISPi adalah sebuah kartu yang menampilkan QR Code yang bisa digunakan oleh pengguna layanan untuk mengakses informasi mengenai status perkara yang sedang berjalan sesuai dengan nomor perkara yang menyangkut kepentingannya pada Pengadilan Negeri Majalengka khusus untuk perkara perdata. Pemegang kartu tersebut (pihak berperkara) dapat memindai QR Code yang terdapat pada kartu dan langsung dapat menelusuri perkaranya.</p>
		<p>5. siDORA (Aplikasi Dokumen Perkara)</p>	<p>Aplikasi siDORA adalah Aplikasi yang membantu untuk mencari Dokumen Perkara SIPP antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Putusan, b. Dokumen Tuntutan, c. Dokumen Petitum, d. Dokumen Dakwaan, e. Dokumen Direktori Putusan, dan f. Dokumen Relas di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II. <p>Aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan Hakim, PP dan Jurusita mengakses dokumen perkara langsung ke dokumen yang dibutuhkan.</p>

		<p>Aplikasi siDORA ini hanya dapat diakses pada jaringan lokal Pengadilan Negeri Majalengka yaitu pada tautan http://192.168.1.111/dev-dok/</p>
	6. NGAPEL (Ngabsen Apel Online)	<p>NGAPEL adalah aplikasi absensi berbasis Google Form yang digunakan untuk mengisi daftar hadir Hakim, Pegawai, dan PPNPN pada saat apel di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II sebagai pengganti absensi manual selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II. Aplikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menjaga kedisiplinan para aparaturnya Pengadilan Negeri Majalengka dalam mengikuti apel pagi di hari Senin dan apel sore di hari Jumat. NGAPEL bisa diakses oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Majalengka melalui link http://ngapel.pn-majalengka.go.id, sedangkan untuk mencetak hasil laporannya, bagian kepegawaian bisa mencetaknya melalui link http://mongapel.pn-majalengka.go.id</p>
	7. MANTEP (Mesin Antrian PTSP)	<p>MANTEP adalah Mesin Antrian PTSP yang digunakan sebagai antrian pada pelayanan kepada pengguna layanan di bagian PTSP. Pengguna layanan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang terdapat di dekat pintu masuk PTSP dengan link http://192.168.1.111/antrian/antrian_depan, pengguna layanan menekan tombol antrian sesuai layanan yang akan di tuju. Maka akan keluar cetakan nomor antrian pada mesin tersebut. Kemudian Petugas PTSP mengakses aplikasi MANTEP pada link http://192.168.1.111/antrian/dashboard dan login sesuai meja masing-masing. Setelah login maka petugas PTSP dapat memanggil pengguna layanan yang sudah mempunyai nomor antrian dengan</p>

			<p>menekan tombol panggil pada aplikasi PTSP.</p> <p>Setelah Petugas PTSP menekan tombol panggil, maka pada layar monitor Informasi secara otomatis akan tampil nomor antrian yang dipanggil dan akan mengeluarkan suara panggilan sesuai nomor antrian yang dipanggil.</p>
		8. DASHBOARD PN Majalengka	<p>Aplikasi DASHBOARD PN Majalengka adalah aplikasi yang berisi semua shortcut menuju link aplikasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Majalengka dan aplikasi-aplikasi instansi terkait yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Aplikasi DASHBOARD ini dibuat untuk mempermudah para pegawai Pengadilan Negeri Majalengka dalam mengakses berbagai aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, karena dengan banyaknya aplikasi dan inovasi yang ada, dan karena panjangnya link aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga membuat para pegawai tidak bisa mengingat link aplikasi yang ingin dituju. Aplikasi DASHBOARD PN Majalengka hanya bisa diakses di jaringan Lokal Pengadilan Negeri Majalengka pada tautan http://192.168.1.111/page atau pada link http://page.pn-majalengka.go.id</p>
16	PN PURWAKARTA	SIAGA SATU	<p>Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SIAGA SATU (Sistem Anti Gratifikasi Setiap Tugas Dan Fungsi) yang mencakup konfirmasi pada pengguna tentang ada tidaknya gratifikasi dan tindak lanjutnya.</p>
		SIAGA CEPAT	<p>Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SIAGA CEPAT (Sistem Penerimaan Pengaduan Reaksi Cepat) yang mencakup sarana - sarana pengaduan Pengadilan Negeri Purwakarta meliputi WA, pengaduan melalui FB, IG, dll.</p>
		SI PUMA	<p>Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B juga menyediakan Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SI PUMA (Sistem Perpustakaan Untuk Masyarakat) dimana</p>

		perpustakaan terkoneksi dengan PTSP dan dapat diakses oleh masyarakat.
	SI GARAM	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SI GARAM (Sistem Pengadilan Ramah Dan Nyaman), yang mencakup sarana prasarana bersih, lengkap, nyaman, dingin, hospitality.
	MARANGGI	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan MARANGGI (Mari Bincang-Bincang Lagi) yaitu Podcast seputar peradilan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
	ZONA DISEMINASI	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan ZONA DISEMINASI yaitu Sarana sosialisasi produk, layanan dan kebijakan pengadilan.
	SI ORGI	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SI ORGI (Sistem Informasi Digital) yaitu informasi-informasi Pengadilan Negeri Purwakarta sudah digital, misal ada TV, Ebanner –Ebanner.
	SIAGA TIGA	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SIAGA TIGA (Sistem Pengumuman Tiga Bahasa), yaitu pengumuman-pengumuman di Pengadilan Negeri Purwakarta dilakukan tiga bahasa, yaitu Inggris, Indonesia, Sunda.
	SI MAMAT	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SI MAMAT (Sistem Informasi Jawab Otomatis), yaitu permohonan info via WA dan dijawab otomatis oleh mesin/robot artificial inteligent.
	SI KOMAN	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SI KOMAN (Sistem Kompensasi Layanan) yaitu Kompensasi bagi pengguna atas penyimpangan dari stasiun standar layanan.

		SI MADU	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SI MADU (Sistem Pelayanan Madukara Terpadu) yang mencakup layanan PTSP pada madukara, layanan sidang di MPP, layanan sidang online, terintegrasi dengan catatan sipil.
		SIAGA PRIMA	Inovasi Bidang Pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi yaitu pelayanan SIAGA PRIMA (Sistem Antar Jaga Prioritas Melayani) yaitu antar jemput pengguna (pn pwk goes to customer) dan cermin peradilan inklusif.
		E-SURKEP	Inovasi Bidang Tata Kelola Berbasis Elektronik yaitu pelayanan E-SURKEP (Elektronik Surat Keputusan) aplikasi yang menghimpun seluruh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pengadilan dan dapat diakses secara online.
		WASABI	Inovasi Bidang Tata Kelola Berbasis Elektronik yaitu pelayanan WASABI (Pengawasan dan Pembinaan) pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang dan terus menerus sesuai Perma 7, 8, dan 9 Tahun 2016 berupa video yang diunggah di channel youtube resmi PN Purwakarta.
		E-REMINDER	Inovasi Bidang Tata Kelola Berbasis Elektronik yaitu E-REMINDER (Elektronik Pengingat Tugas Tiap Unit) Pengingat akan tugas-tugas tiap unit pada televisi yang ada di setiap ruangan.
		E-POSBAKUM	Inovasi Bidang Tata Kelola Berbasis Elektronik yaitu E-POSBAKUM (Elektronik Register Layanan Posbakum) register elektronik dari pelaksanaan tugas Pos Bantuan Hukum.
		E-PERLISAN	Inovasi Bidang Tata Kelola Berbasis Elektronik yaitu E-PERLISAN (Elektronik Permohonan Salinan Putusan) Pengajuan permohonan salinan putusan pidana secara online.
17	PN SUBANG	SIADIL	SIADIL (<i>PTSP Mandiri</i>) atau Sistem Informasi Digital Peradilan sebagai bentuk pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan publik oleh Pengadilan Negeri Subang

	e-SIMPEL	e-SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik).e-SIMPEL ini untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tak perlu datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi.
	Buku Braille Layanan PTSP	Buku yang berisi pelayanan yang ada di PTSP Pengadilan Negeri Subang . untuk kaum disabilitas tunanetra
	Kartu Antrian Prioritas	Kartu antrian prioritas diperuntukan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam mendapatkan pelayanan PTSP
	Ruang Khusus Disabilitas	ruangan tunggu bagi disabilitas berisi Kursi Roda bagi disabilitas dan petugas pendamping disabilitas
	AUDIO LAYANAN INFORMASI	Merupakan aplikasi pemutar suara audio otomatis tentang: pemberitahuan gratifikasi, himbuan untuk menjaga kebersihan kantor, Pidato KMA, Informasi jadwal sidang, himbuan tentang tata cara berpakaian.
	Sistem Aplikasi Peminjaman Berkas Perkara	Merupakan aplikasi untuk memudahkan pegawai terutama kaum rentan dalam peminjaman berkas perkara.
	e-SISIP (Sistem Informasi Surat Izin Pegawai)	Merupakan aplikasi untuk memberikan informasi tentang ketidakhadiran pegawai yang dapat diakses oleh semua pegawai dan sebagai monitoring oleh pimpinan.
	e-SIMPAN	Merupakan aplikasi untuk memonitoring data pemeliharaan kendaraan roda empat
	Aplikasi Permintaan ATK Prioritas	Merupakan aplikasi permintaan persediaan ATK secara online yang memudahkan pegawai dalam mengajukan permintaan ATK

		Video Bahasa Isyarat	Merupakan inovasi video berbahasa isyarat yang memuat layanan PTSP PN Subang bagi penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu
18	PN SUKABUMI	- Kartu Antrian Prioritas Untuk Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan	Kartu antrian prioritas diperuntukan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam mendapatkan pelayanan PTSP dengan tujuan memperoleh kemudahan akses pelayanan tanpa perlu menunggu antrian umum
		- Brosur Elektronik	Brosur Elektronik mengenai: - Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas - Persyaratan Perkara Gugatan dan Upaya Hukum - Persyaratan Perkara Perdata Permohonan - Pengajuan Surat Keterangan Melalui Aplikasi Eraterang - Pendaftaran Surat Kuasa Melalui Aplikasi E-Suka
		- Buku Informasi Menggunakan Huruf Braille	Buku huruf braille terdiri dari: 1. Standar pelayanan publik kepaniteraan Pidana 2. Standar pelayanan publik kepaniteraan Hukum
		- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan PTSP Bagi Penyandang Disabilitas	SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan menjadi panduan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana, dan siapa yang melakukan setiap alur aktivitas pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas
		- Pelatihan Bahasa Isyarat Kepada Petugas PTSP	Pelatihan Bahasa Isyarat dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Sukabumi
		- Video informasi dengan bahasa isyarat	Video yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat ini terdiri dari 3 video yaitu: 1. video tata cara penggunaan aplikasi E-Suka 2. video tata cara penggunaan aplikasi E-Raterang 3. video tata cara penggunaan aplikasi E-Court

		- Penyediaan Media Informasi Berupa Audiobook	Audiobook terdiri dari: 1. Panduan persyaratan pengajuan perkara di kepaniteraan pidana 2. Panduan persyaratan pengajuan perkara di kepaniteraan hukum 3. Panduan persyaratan pengajuan perkara di kepaniteraan perdata
		- Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laktasi dan Ruang Ramah Anak	- Pada ruang laktasi, telah disediakan kebutuhan terkait laktasi yaitu cool box penyimpanan ASI sementara, dispenser beserta air mineral steril, dan wastafel - Pada ruang ramah anak, telah disediakan pagar pembatas babyfence, karpet susun, dan alat bermain anak
19	PN SUMBER	INDILANDS	INDILANDS (Informasi Digital Layanan Pengadilan Negeri Sumber) Merupakan Layar Monitor LED 50" yang berada di PTSP, yang berisi tentang informasi layanan yang ada di Pengadilan Negeri Sumber yang bisa dilihat oleh pencari keadilan.
		SI ANTRI	SI ANTRI merupakan aplikasi antrian yang memudahkan pencari keadilan dalam mengakses layanan di Pengadilan Negeri Sumber dan membedakan panggilan suara tiap bagian di PTSP
		SCAN PATROLI	Merupakan aplikasi yang digunakan oleh Satpam saat jaga malam dan melakukan patroli untuk men Scan Barcode yang ada di beberapa sudut Gedung hingga memastikan kondisi aman dan terkendali.
		AUDIO GRATIFIKASI	Merupakan aplikasi pemutar suara audio otomatis tentang pemberitahuan gratifikasi maupun himbauan untuk menjaga kebersihan kantor
		VIDEO LAYANAN DISABILITAS	Merupakan Inovasi yang menggunakan VIDEO Digital yang sudah dilengkapi dengan bahasa isyarat untuk membantu kaum disabilitas mendapatkan informasi mengenai alur pelayanan di PTSP
20	PN SUMEDANG	Buku Katalog Pelayanan PTSP Braile	Buku Katalog Pelayanan yang ada di PTSP khusus untuk kaum disabilitas tunanetra

		Video Layanan Disabilistas	Inovasi berupa video yang sudah dilengkapi dengan bahasa isyarat untuk membantu kaum disabilitas dalam memahami pelayanan yang ada di PTSP Pengadilan Negeri Sumedang.
		Whatsapp autoreply app berbasis audio untuk kaum disabilitas	Inovasi pelayanan berbasis whatsapp untuk pelayanan kepaniteraan perdata dengan output audio
		One Day Service	Inovasi Pelayanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan, Izin Besuk dalam waktu satu hari sejak mulai pendaftaran di Meja PTSP
		Antrian Pengunjung	Aplikasi yang terdapat dalam mesin antrian memudahkan manajemen antrian pada layanan masyarakat agar mempermudah para pencari keadilan atau tamu merasa nyaman dan mudah dalam memperoleh haknya untuk dilayani, serta memberikan kemudahan pada petugas pelayanan dalam melayani pelanggan sehingga tercapainya service excellent dan mempermudah pengelolaan sehingga ada efisiensi dan efektifitas waktu sehingga tercipta kelancaran dalam pelayanan. Sehingga seorang petugas pelayanan akan lebih bisa fokus pada pekerjaannya tanpa ada gangguan selain seseorang yang ada di depannya saja, tanpa ada interupsi dari para pencari keadilan lain yang belum terlayani.
		Komputer Pojok e-Court	Komputer Pojok e-court merupakan komputer khusus yang di sediakan Pengadilan Negeri Sumedang bagi para pencari Keadilan yang ingin melakukan pendaftaran perkara secara elektronik di Kantor Pengadilan Negeri Sumedang. Sehingga dengan adanya komputer pojok e-court pendaftaran perkara secara elektronik akan lebih efisien dan cepat. Komputer pojok e-court di lengkapi dengan scanner dan printer untuk memudahkan para pencari keadilan
21	PN TASIKMALAYA	One Day Service	Inovasi pelayanan penyelesaian perkara Permohonan Ganti Nama dan Perbaikan Kesalahan Pada Akta Kelahiran dalam waktu satu hari terhitung sejak pendaftaran, proses persidangan, putusan,

		minutasi, sampai keluarnya salinan penetapan tersebut
	Kunaon (Kujawab Nanyamu Online)	Merupakan Sistem Jawab Otomatis Melalui Aplikasi Whatsapp untuk para pengguna Pengadilan yang memerlukan informasi mengenai pengadilan, jadwal sidang dan status perkara
	Si Pakum Purbasora (Siaran Radio Paham Hukum)	Merupakan kegiatan sosialisasi hukum dan layanan-layanan yang ada di PN Tasikmalaya yang bekerja sama dengan Radio Daerah Kabupaten Tasikmalaya (PURBASORA 105.7 PAS FM) dan dilaksanakan secara rutin setiap hari Kamis minggu ke-4 tiap bulannya.
	Ruang Tamu Online	Merupakan inovasi PN Tasikmalaya yang memanfaatkan teknologi video teleconference sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat bertemu secara virtual dengan Ketua dan Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Para Hakim.
	PTSP Online	Merupakan layanan informasi berbasis website terkait layanan PTSP PN Tasikmalaya yang ramah bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas dilengkapi dengan fitur disabilitas (screen reader) dan chat kepada petugas PTSP dengan alamat situs https://ptsp.pn-tasikmalaya.go.id/
	Posbakum Online	Merupakan layanan Posbakum secara online melalui fitur whatsapp business bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang dilakukan pada jam kerja Posbakum PN Tasikmalaya
	E-OSSA (Aplikasi Permintaan Persediaan ATK)	Merupakan aplikasi permintaan persediaan ATK secara online yang memudahkan pegawai dalam mengajukan permintaan ATK
	Audio DBR	Merupakan layanan informasi tentang panduan persyaratan pengajuan perkara bagi penyandang disabilitas tuna rungu melalui Audiobook Online PN Tasikmalaya

		Audio Book Online	Merupakan layanan informasi tentang panduan persyaratan pengajuan perkara bagi penyandang disabilitas tuna rungu melalui Audiobook Online PN Tasikmalaya
		Video Bahasa Isyarat	Merupakan inovasi video berbahasa isyarat yang memuat layanan PTSP PN Tasikmalaya bagi penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu
		Buku Braille Layanan PTSP	Merupakan inovasi buku braille bagi penyandang disabilitas tuna netra yang memuat layanan PTSP PN Tasikmalaya
		Aplikasi Penerimaan PNB	Merupakan aplikasi penerimaan PNB secara online yang memudahkan pencatatan dan penyetoran keuangan PNB
22	PN BANJAR	SITAMPAN	Merupakan Aplikasi pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Banjar yang dapat diakses secara online.
23	PN CIKARANG	Aplikasi SI AMOR	Aplikasi yang berfungsi sebagai pengingat/remainder kepada Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa/Penuntut Umum tentang adanya jadwal persidangan pada hari itu
		Aplikasi SI SAPU	Aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan e-Doc Salinan Putusan secara elektronik kepada terdakwa melalui e-mail Lembaga Pemasarakatan yang terdaftar
		Pintu PTSP Pengadilan Negeri Cikarang	berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang meminta informasi dari petugas PTSP PN Cikarang, tidak perlu datang ke kantor PN Cikarang melainkan dapat mengajukan melalui aplikasi tersebut
		Aplikasi SIPANDAI	berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Cikarang baik melalui prosedur biasa maupun prosedur khusus, dapat mengajukan secara elektronik tanpa harus datang ke kantor pengadilan

		AWASIN Elektronik	berfungsi untuk mempermudah hakim maupun pegawai pada saat mengajukan ijin keluar selanjutnya aplikasi ini juga mempermudah pimpinan dalam melakukan pemantauan kepada seluruh hakim dan pegawai, termasuk diantaranya hakim atau pegawai yang mengajukan ijin.
		SURVEY POSBAKUM	Survey Posbakum merupakan Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat bagi para pengguna Posbakum. Dengan adanya Aplikasi survey tersebut, kita dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Posbakum. Hasil Survey Posbakum ini nantinya juga dijadikan sebagai salah satu bahan Monitoring dan Evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh Panmud Hukum sehingga diharapkan ke depannya Posbakum juga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
		ATK PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Aplikasi ini memungkinkan untuk Pengajuan Permintaan ATK dari masing-masing ruangan secara elektronik. Dengan adanya Aplikasi tersebut masing-masing user dari setiap bidang dapat mengetahui jumlah stok ATK yang sudah habis maupun yang tersedia sehingga masing-masing bidang dapat mengajukan permintaan ATK sesuai kebutuhan dan ketersediaan barang-barang yang ada.



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal.

B. Evaluasi.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

a) Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi manajemen agar organisasi berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan SDM dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian adanya pengawasan dapat diketahui proses suatu kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Maka, jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik, maka tidak dapat menghasilkan atau mencapai tujuan yang memuaskan.

Pada dasarnya tujuan dari pengawasan/pengendalian antara lain adalah menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan mengurangi hambatan-hambatan.

Melalui pengawasan/pengendalian ini organisasi berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor penyebabnya, yakni dengan Tindakan perbaikan (corrective action).

Maka, pengawasan itu bertujuan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana, mencegah terjadinya kesalahan, mengupayakan komitmen telah dilaksanakan.

b) Ruanglingkup Pengawasan

Pengawasan Bidang Pengawasan Bidang pada Pengadilan Tinggi Jakarta dilaksanakan sesuai Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/8R/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 adalah melakukan pengawasan rutin/regular yakni secara rutin melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan sesuai dengan kewenangannya : Fungsi dari Pengawasan Bidang ini adalah :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

- b. Mengendalikan administrasi peradilan tetap terkelola dengan tertib dan dilakukan dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik yang baik.

B. EVALUASI

1. Evaluasi Pengawasan Bidang

- a. Pengawasan bidang oleh hakim pengawas bidang tertentu baik di Pengadilan Tinggi Jakarta maupun di Pengadilan Negeri di bawahnya telah berjalan tertib dijalankan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
- b. Temuan-temuan yang berupa ketidaksesuaian akan dicatat dalam buku pengawasan sebagai data. Kolom-kolom buku pengawasan telah standar atau format yang seragam.
- c. Hakim pengawas bidang secara tertib membuat laporan hasil pengawasan bidang setiap bulan dan hal tersebut akan dimonitor dan dievaluasi oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- d. Melalui pengawasan bidang ini maka permasalahan yang terjadi di tiap bidang dapat ditelusuri secara dini dan akan mendapat jalan keluar sesuai rekomendasi dari hakim pengawas bidang serta tindak lanjut ketidaksesuaian tersebut dimonitor.

2. Evaluasi Assesmen Internal

Assesmen internal merupakan nomenklatur dalam AMPUH. Melalui assesmen Internal yang diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, dapat diketahui kesesuaian maupun ketidaksesuaian kinerja dari pengadilan. Tahapan-tahapan dalam assesmen internal didahului dengan rencana pelaksanaan dan penyusunan daftar pertanggal, serta evaluasi terhadap tindak lanjut hasil assessment sehingga apa yang telah dilaksanakan telah benar-benar sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Pengawasan daerah

Tindak lanjut hasil pengawasan daerah yang telah disampaikan oleh pengadilan negeri kepada pengawas daerah dari pengadilan tinggi Bandung dilakukan evaluasi, apakah tindak lanjut yang telah dilaksanakan relevan dan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ada.

4. Evaluasi Capaian Kinerja

Pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Barat dilakukan evaluasi capaian kinerja secara sistematis menggunakan aplikasi e-Cakra, sehingga pimpinan dapat secara realtime melakukan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan reuiu terhadap capaian kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Rekomendasi.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang ada dalam laporan tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan desember 2024 rata-rata diatas 80%, tepat 3 jenis perkara dengan tingkat penyelesaian di bawah 80% yaitu
 - I. Keadaan Perkara **Perdata Gugatan** Tahun 2023 pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
 - Jumlah Perkara = 5.098 perkara
 - Putus = 3.589 perkara
 - Persentase Penyelesaian: 70,40%
 - II. Keadaan Perkara Perlawanan (*Derden Verzet*) Tahun 2023 Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi Bandung
 - Jumlah Perkara = 145 perkara
 - Putus = 88 perkara
 - Persentase Penyelesaian: 60,69%
 - III. Keadaan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan PHI Bandung
 - Jumlah Perkara = 273 perkara
 - Putus = 203 perkara
 - Persentase Penyelesaian: 74,36%

Melalui data yang telah disajikan pada Bab II sebelumnya, maka tingkat kepercayaan para pencari keadilan sangat tinggi, dimana putusan tingkat pertama tahun 2024 sebanyak 14.276 dengan klasifikasi jenis perkara yang dapat menjadi kewenangan Tingkat Banding, hanya 1.541 perkara dari 14.276 perkara yang di ajukan upaya hukum banding diluar perkara pidana putusan bebas yang langsung diajukan kasasi. Artinya tingkat kepercayaan pencari keadilan di wilayah jawa barat adalah 89,21% (para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding), hanya 10,79% perkara yang diajukan permohonan upaya hukum banding.

Dalam tahun 2024 pengadilan tinggi bandung menerima perkara sebanyak 1.407 dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 134, sehingga total beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 1.541 perkara.

Dari 1.541 perkara sebanyak 1.389 perkara diselesaikan dengan tepat waktu adapun sisa perkara sebanyak 155 perkara masih dalam tenggat waktu penyelesaian perkara.

Selanjutnya adalah perbanding perkara banding yang diajukan atau tidak diajukan kasasi pada tahun 2024 terdapat 1389 perkara yang telah diputus, dari jumlah perkara yang diputus banding, 833 perkara atau **59.97%** yg mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan 471 perkara atau **33.91%** tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan 85 Perkara atau **6.12%** sampai data ini disajikan masih dalam proses pemberitahuan putusan banding.

3. Pada bidang kesekretariatan pelaksanaan pada umumnya sudah berjalan dengan baik, kendati pada aspek kebutuhan sumberdaya manusia masih belum terpenuhi sebagaimana dalam Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
4. pelaksanaan realisasi anggaran baik DIPA 01 dan DIPA 03 rata-rata diatas 90%, untuk capaian realisasi pada Pengadilan Tinggi Bandung, untuk **DIPA 01** adalah **99.26%** dan **DIPA 03** adalah **99.81%**.
5. pelaksanaan penatausahaan asset Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Bandung dan pengadilan negeri se-wilayah jawa barat berjalan dengan baik.
6. Pada bidang pengawasan Pengadilan Tinggi Bandung tentunya sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, baik dilakukan secara regular/rutin juga dilakukan melalui virtual dan terjadwal.
7. Pengaduan yang dilayangkan pada Pengadilan Tinggi Bandung atau pun yang terkait dengan Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2024 sebanyak 12 pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

B. REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan jalannya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Bandung, masih terdapat kekurangan dan hambatan maka dipandang perlu :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Pengembangan peningkatan kemampuan melalui pelaksanaan/ keikutsertaan diklat dan bimtek pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.
3. Pembangunan Gedung tambahan peruntukan ruang sidang dan ruang kerja Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung
4. Penambahan anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana mengingat sarana IT yang dimiliki sudah tidak memadai, lambat dan sering diperbaiki, hal lainnya adalah pembangunan rumah dinas dan sarana mebelair rumah dinas.